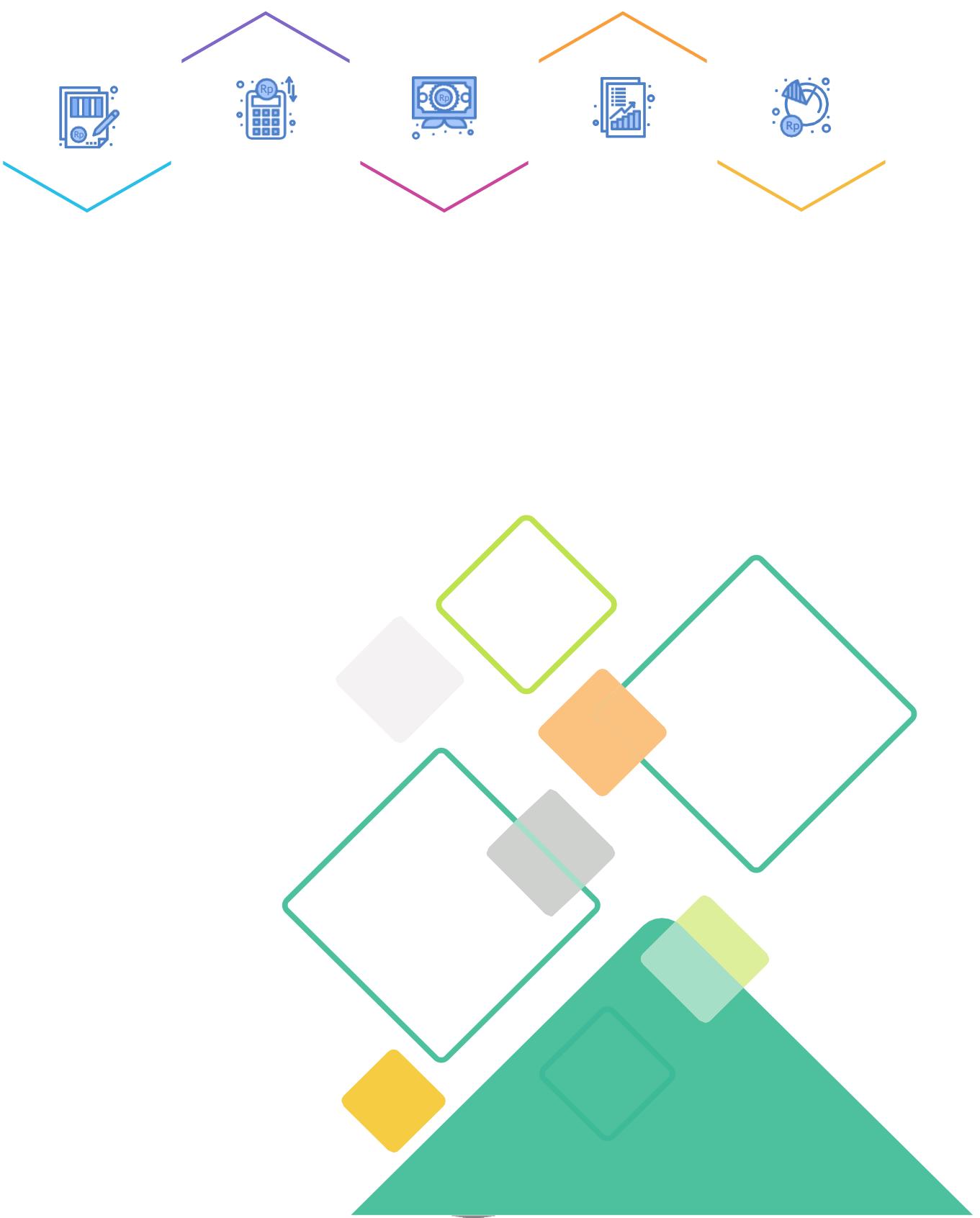


# Catatan atas Laporan Keuangan



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
1.2    LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN .....	1
1.3    SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	4
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....	5
2.1    IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN .....	5
2.2    HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN ....	6
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....	9
3.1    RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	9
3.1.1    Pendapatan-LRA.....	9
3.1.1.1    Pendapatan Asli Daerah .....	9
3.1.2    Belanja .....	9
3.1.2.1    Belanja Operasi .....	10
3.1.2.1.1    Belanja Pegawai .....	10
3.1.2.1.2    Belanja Barang dan Jasa.....	11
3.1.2.2    Belanja Hibah .....	12
3.1.2.3    Belanja Bantuan Sosial .....	14
3.1.2.4    Belanja Modal .....	21
3.1.2.4.1    Belanja Modal Peralatan dan Mesin .....	22
3.1.2.4.3    Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	22
3.1.2.4.4    Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	23
3.1.2.4.5    Belanja Modal Aset Tetap Lainnya .....	24
3.1.2.4.6    Belanja Modal Aset Lainnya .....	24
3.1.2.5    Belanja Dana Keistimewaan .....	24
3.2.    RINCIAN DAN PENJELASAN NERACA.....	25
3.2.1    Aset.....	25
3.2.1.1    Aset Lancar .....	25
3.2.1.1.1    Persediaan .....	25
3.2.1.2    Aset Tetap.....	26
3.2.1.2.1    Tanah .....	26
3.2.1.2.2    Peralatan dan Mesin .....	27
3.2.1.2.3    Gedung dan Bangunan.....	31
3.2.1.2.4    Jalan, Jaringan, dan Irigasi.....	32
3.2.1.2.5    Aset Tetap Lainnya.....	33
3.2.1.2.6    Konstruksi Dalam Penggerjaan .....	34
3.2.1.2.7    Akumulasi Penyusutan.....	35

3.2.1.3 Aset Lainnya .....	36
3.2.1.3.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.....	36
3.2.1.3.2 Aset Tak Berwujud .....	36
3.2.1.3.3 Aset Lain-lain.....	37
3.2.2 Kewajiban .....	37
3.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek .....	37
3.2.2.1.1 Utang Belanja.....	37
3.2.3 Ekuitas .....	38
3.3 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL .....	38
3.3.1 Pendapatan-LO .....	38
3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.....	38
3.3.1.1.1 Retribusi Daerah-LO .....	39
3.3.2 Beban .....	39
3.3.2.1 Beban Operasi .....	39
3.3.2.1.1 Beban Pegawai.....	39
3.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa .....	39
3.3.2.1.3 Beban Hibah.....	40
3.3.2.1.4 Beban Bantuan Sosial.....	40
3.3.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	41
3.3.3 Surplus/Defisit –LO .....	41
3.4 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	41
3.4.1 Ekuitas Awal.....	42
3.4.2 Surplus/Defisit .....	42
3.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar .....	42
3.4.4 Ekuitas Akhir .....	42
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN .....	43
BAB V PENUTUP .....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	5
Tabel 3. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah .....	9
Tabel 3. 2 Anggaran dan Realisasi Belanja.....	9
Tabel 3. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.....	10
Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa .....	11
Tabel 3. 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial dan UPTD .....	12
Tabel 3. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah.....	12
Tabel 3. 7 Rincian Hibah Dinas Sosial.....	13
Tabel 3. 8 Rincian Penerima Hibah .....	13
Tabel 3. 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial .....	14
Tabel 3. 10 Rincian Penerima Bantuan Sosial .....	15
Tabel 3. 11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	22
Tabel 3. 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	22
Tabel 3. 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan .....	23
Tabel 3. 14 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan .....	23
Tabel 3. 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi .....	23
Tabel 3. 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi .....	23
Tabel 3. 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya .....	24
Tabel 3. 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya .....	24
Tabel 3. 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan .....	25
Tabel 3. 20 Rincian Saldo Persediaan Dinas Sosial.....	25
Tabel 3. 21 Saldo Persediaan di Dinas Sosial dan UPTD.....	25
Tabel 3. 22 Aset Tetap Dinas Sosial.....	26
Tabel 3. 23 Rincian Aset Tetap - Tanah .....	26
Tabel 3. 24 Rincian Tanah Dinas Sosial dan UPTD.....	26
Tabel 3. 25 Mutasi Tanah.....	27
Tabel 3. 26 Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin.....	27
Tabel 3. 27 Peralatan dan Mesin Dinas Sosial dan UPTD.....	27
Tabel 3. 28 Mutasi Peralatan dan Mesin .....	27
Tabel 3. 29 Rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan .....	31
Tabel 3. 30 Gedung dan Bangunan Dinas Sosial dan UPTD.....	31
Tabel 3. 31 Mutasi Gedung dan Bangunan .....	31
Tabel 3. 32 Rincian Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi .....	32
Tabel 3. 33 Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Sosial dan UPTD.....	32
Tabel 3. 34 Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi .....	32
Tabel 3. 35 Rincian Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya .....	33
Tabel 3. 36 Aset Tetap Lainnya Dinas Sosial dan UPTD.....	33
Tabel 3. 37 Mutasi Aset Tetap Lainnya .....	34
Tabel 3. 38 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan .....	34
Tabel 3. 39 Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Sosial dan UPTD .....	34

Tabel 3. 40 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	35
Tabel 3. 41 Rincian Akumulasi Penyusutan.....	35
Tabel 3. 42 Akumulasi Penyusutan Dinas Sosial dan UPTD.....	35
Tabel 3. 43 Rincian Aset Lainnya.....	36
Tabel 3. 44 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.....	36
Tabel 3. 45 Rincian Aset Tak Berwujud .....	36
Tabel 3. 46 Mutasi Aset Tak Berwujud.....	36
Tabel 3. 47 Rincian Aset Lain-lain .....	37
Tabel 3. 48 Rincian Utang Belanja.....	38
Tabel 3. 49 Utang Belanja Dinas Sosial Induk dan UPTD.....	38
Tabel 3. 50 Pendapatan Dinas Sosial Induk dan UPTD.....	39
Tabel 3. 51 Rincian Beban Pegawai.....	39
Tabel 3. 52 Rincian Beban Barang dan Jasa .....	40
Tabel 3. 53 Rincian Beban Hibah.....	40
Tabel 3. 54 Rincian Beban Hibah Menurut Bentuknya .....	40
Tabel 3. 55 Rincian Beban Bantuan Sosial .....	41
Tabel 3. 56 Beban Penyusutan Dinas Sosial.....	41
Tabel 3. 57 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar .....	42
Tabel 4. 1 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	43
Tabel 4. 2 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	44
Tabel 4. 3 Capaian Hasil Penanganan PMKS Melalui Rehabilitasi Sosial.....	44
Tabel 4. 4 Capaian Hasil Penanganan PMKS Melalui Perlindungan dan Jaminan Sosial.....	45
Tabel 4. 5 Capaian Hasil Penanganan PMKS Melalui Penanganan Fakir Miskin .....	45
Tabel 4. 6 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BRTPD.....	46
Tabel 4. 7 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BPRS.....	46
Tabel 4. 8 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BRSBKL.....	46
Tabel 4. 9 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BPRSR .....	47
Tabel 4. 10 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BRSPA .....	47
Tabel 4. 11 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BPSTW .....	48
Tabel 4. 12 Pengukuran Capaian Sasaran 1 .....	48
Tabel 4. 13 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022.....	49
Tabel 4. 14 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2.....	50
Tabel 4. 15 Capaian Hasil Pemberdayaan PSKS dan Masyarakat Melalui Pemberdayaan PSKS dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan .....	50
Tabel 4. 16 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022.....	51
Tabel 4. 17 Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2022 .....	52
Tabel 4. 18 Target dan Realisasi SDGs Dinas Sosial Tahun 2022 .....	53
Tabel 4. 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022.....	54
Tabel 4. 20 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Sosial DIY.....	58

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

### 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Sosial diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 124);

25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104).
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 64);

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
  - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  - 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab III Penjelasan Pos-PoS Laporan Keuangan OPD
  - 3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-PoS Pelaporan Keuangan OPD
    - 3.1.1 Pendapatan-LRA
    - 3.1.2 Belanja
    - 3.1.3 Aset
    - 3.1.4 Kewajiban
    - 3.1.5 Ekuitas
    - 3.1.6 Pendapatan-LO
    - 3.1.7 Beban
    - 3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan OPD
- Bab V Penutup

## BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 yaitu Pendapatan sebesar Rp484.200.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp484.200.000,00. Realisasi belanja sebesar Rp114.920.064.002,00 atau 89,69% dari anggaran sebesar Rp128.135.177.242,00. Adapun Rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/(KURANG)	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>484.200.000,00</b>	<b>484.200.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	484.200.000,00	484.200.000,00	-	100,00
Retribusi Daerah	484.200.000,00	484.200.000,00	-	100,00
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>128.135.177.242,00</b>	<b>114.920.064.002,00</b>	(13.215.113.240,00)	<b>89,68</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	74.357.552.442,00	68.632.313.297,00	(5.725.239.145,00)	92,30
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185.600.000,00	176.212.650,00	(9.387.350,00)	94,94
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.711.345.804,00	39.642.229.351,00	(1.069.116.453,00)	97,37
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.150.000,00	56.294.860,00	(1.855.140,00)	96,81
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.793.808.900,00	1.717.517.336,00	(76.291.564,00)	95,75
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.525.344.646,00	9.961.820.896,00	(1.563.523.750,00)	86,43
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.135.929.500,00	8.707.799.646,00	(428.129.854,00)	95,31
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.947.373.592,00	8.370.438.558,00	(2.576.935.034,00)	76,46
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.632.059.000,00	2.576.902.300,00	(55.156.700,00)	97,90
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	2.632.059.000,00	2.576.902.300,00	(55.156.700,00)	97,90
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	12.000.000,00	11.300.000,00	(700.000,00)	94,17
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	12.000.000,00	11.300.000,00	(700.000,00)	94,17

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	30.655.190.300,00	26.896.225.062,00	(3.758.965.238,00)	87,74
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	8.933.430.900,00	7.467.715.157,00	(1.465.715.743,00)	83,59
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	4.667.588.000,00	4.179.661.945,00	(487.926.055,00)	89,55
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	6.643.754.750,00	5.997.596.814,00	(646.157.936,00)	90,27
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.132.035.400,00	951.047.750,00	(180.987.650,00)	84,01
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	9.278.381.250,00	8.300.203.396,00	(978.177.854,00)	89,46
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.633.456.000,00	6.893.456.128,00	(739.999.872,00)	90,31
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	643.599.000,00	463.505.128,00	(180.093.872,00)	72,02
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	6.989.857.000,00	6.429.951.000,00	(559.906.000,00)	91,99
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	6.660.048.000,00	4.078.544.945,00	(2.581.503.055,00)	61,24
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	6.660.048.000,00	4.078.544.945,00	(2.581.503.055,00)	61,24
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	6.184.871.500,00	5.831.322.270,00	(353.549.230,00)	94,28
Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	6.184.871.500,00	5.831.322.270,00	(353.549.230,00)	94,28

## 2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Secara keseluruhan realisasi belanja Dinas Sosial tahun 2022 sebesar Rp114.920.064.002,00 atau 89,68%. Berikut ini penjelasan per kegiatan dengan realisasi kurang dari 95%:

### 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 94,94%. Realisasi tidak sesuai target diantaranya karena : Honorarium narasumber tidak diberikan karena narasumber berasal dari internal Pemda DIY; Anggaran Makanan dan Minuman Rapat hanya terserap sebagian karena kegiatan Forum OPD diselenggarakan dengan metode daring; Penghematan atau efisiensi belanja perjalanan dinas yaitu menyesuaikan harga tiket pesawat dan penginapan; serta efisiensi belanja barang pakai habis karena menyesuaikan harga pasar.

### 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 86,43%. Realisasi tidak memenuhi target karena adanya efisiensi dari lelang pengadaan belanja modal pembangunan Gedung BPRSW dan BRSBKL, Sisa lelang pengadaan electric generating set dan CCTV di BPRSR.

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 76,46%. Realisasi tidak sesuai target karena ada efisiensi yaitu belanja BBM dan pemeliharaan kendaraan serta penggantian suku cadang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kendaraan; Sisa lelang pengadaan pemeliharaan bangunan gedung; serta pembangunan perluasan Gudang di Pengok belum terlaksana karena terkendala pembebasan lahan.

4. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 94,17%. Belanja tidak sesuai target karena ada efisiensi belanja Sewa hotel (*paket meeting half-day*) yang menyesuaikan harga.

5. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti

Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 83,59%. Realisasi tidak sesuai target karena Efisiensi lelang pengadaan dan menyesuaikan kebutuhan bahan makanan PPKS di BRTPD (sisa anggaran 646.072.240) dan BRSBKL (sisa anggaran 479.088.440) ; Efisiensi dari negosiasi pengadaan alat/bahan kantor di BRSBKL; Penyerapan anggaran sesuai kebutuhan pemulasaraan jenazah PPKS di BRSBKL dan BRTPD;

6. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti

Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 89,55%. Realisasi tidak sesuai target karena Efisiensi pengadaan dan menyesuaikan kebutuhan bahan makanan PPKS di BRSPA (sisa anggrana 353.653.350); Menyesuaikan harga pasar untuk belanja modal alat pembersih (mesin cuci) di Dinas Sosial Induk; Belanja bimbingan teknis (belanja uang saku anak asuh) dengan target 108 anak dan realisasi per bulan rata-rata 98 anak;

7. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 90,27%. Realisasi tidak sesuai target karena sesuai target karena Efisiensi pengadaan dan menyesuaikan kebutuhan bahan makanan PPKS di BPSTW (sisa anggaran 444.645.120). Sisa anggaran penyediaan sandang untuk PPKS ( sisa anggaran 135.846.316,00); Sisa anggaran untuk pemulasaan jenazah (dari anggaran untuk 50 orang, PPKS yang meninggal 28 orang)

8. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti

Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 84,01%. Realisasi tidak sesuai target untuk belanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan PPKS di BRSBKL (sisa anggaran 178.926.250);

9. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 89,46%. Realisasi tidak sesuai target karena Efisiensi pengadaan dan menyesuaikan kebutuhan bahan makanan PPKS di BPRSW (sisa anggaran 207.547.540) dan di BPRSR (sisa anggaran 405.272.960); Sisa lelang pengadaan Alat/bahan kantor di BPRSR (72.692.500); Belanja Bimbingan Teknis (uang saku PPKS) di BPRSR sesuai dengan kebutuhan;

10. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal  
Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 72,02%. Realisasi tidak sesuai target untuk Belanja jasa jalan/tol yang menyesuaikan dengan biaya tol (jarak dan lokasi penjangkauan); Belanja perjalanan dinas sesuai kebutuhan dan jarak/lokasi;
11. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi  
Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 91,99%. Belanja Bantuan Sosial untuk individu tidak seluruhnya tersalur karena Sesuai SK penerima DBHCHT sebanyak 1.598 orang namun hanya dicairkan 1.594 dikarenakan saat entri ada 4 nama yg dobel, untuk bantuan sosial penanganan dampak inflasi: usulan awal sebanyak 2.884 penerima hanya dicairkan sebanyak 2.314 penerima dikarenakan setelah di verifikasi dan validasi kembali ada yang tidak sesuai juknis, misalnya sudah menerima bansos lain dari APBN (PKH, BLT Sembako, BLT BBM), ada juga yang sudah mampu, menjadi ASN/TNI/POLRI/Perangkat Kalurahan/Kelurahan, meninggal tanpa ahli waris dan pindah ke luar daerah; Belanja sewa hotel senilai 23.000.000 tidak direalisasikan karena Kegiatan untuk koordinator daerah (Korda) BPNT pembentukan dari Kemensos RI, namun ada kebijakan dari Kemensos RI untuk Korda BPNT dilebur menjadi pendamping PKH sehingga kegiatan sudah tidak sesuai untuk dilaksanakan;
12. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi  
Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 61,24%. Kegiatan penyaluran air bersih sesuai kebutuhan sehingga efisiensi untuk belanja BBM, belanja air, belanja honorarium dan belanja perjalanan dinas. Pada sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi pengungsi dari anggaran 4.119.177.000 terealisasi 2.079.045.645 atau 50,47% karena menyesuaikan kebutuhan operasional shelter, sehingga ada sisa anggaran untuk belanja penyediaan makanan, belanja honorarium dan belanja barang pakai habis untuk kebutuhan shelter.
13. Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman  
Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 94,28%. Adanya efisiensi sewa genset dan Sewa sound system karena menyesuaikan harga pasar; Sebagian lokasi sudah memiliki panggung permanen sehingga tidak tidak memerlukan sewa panggung. Sisa lelang pengadaan untuk hibah barang KUBE Lestari Budaya (sisa anggaran 46.113.390).

### BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 3.1 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	2022	2021 (Audited)
<b>3.1.1 Pendapatan-LRA</b>	<b>Rp484.200.000,00</b>	<b>Rp388.200.000,00</b>

Pendapatan-LRA Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp484.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp484.200.000,00 atau 100,00%. Realisasi Pendapatan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp96.000.000,00 dibandingkan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp388.200.000,00.

<b>3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp484.200.000,00</b>	<b>Rp388.200.000,00</b>
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Pendapatan Asli Daerah Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp484.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp484.200.000,00 atau 100,00%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Sosial Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp96.000.000,00 atau 24,72% dibandingkan realisasi tahun lalu yaitu sebesar Rp388.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

No.	Uraian	Tahun 2022		(% Capaian	Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>484.200.000,00</b>	<b>484.200.000,00</b>	<b>100</b>	<b>388.200.000,00</b>
	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>484.200.000,00</b>	<b>484.200.000,00</b>	<b>100</b>	<b>388.200.000,00</b>
	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>484.200.000,00</b>	<b>484.200.000,00</b>	<b>100</b>	<b>388.200.000,00</b>
	<b>Retribusi Pemakaian Ruangan</b>	<b>484.200.000,00</b>	<b>484.200.000,00</b>	<b>100</b>	<b>388.200.000,00</b>

Retribusi Pemakaian Ruangan dianggarkan Rp484.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp484.200.000,00 atau 100% merupakan pendapatan dari Retribusi Pemakaian Ruang berupa sewa Ruang untuk kantin dan tempat fotocopy sebesar Rp4.200.000,00 di Dinas Sosial dan Retribusi Pemakaian Ruang/kamar di BPSTW sebesar Rp480.000.000,00.

<b>3.1.2 Belanja</b>	<b>Rp114.920.064.002,00</b>	<b>Rp89.699.907.923,04</b>
----------------------	-----------------------------	----------------------------

Anggaran Belanja Perubahan Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp128.135.177.242,00. Sampai dengan akhir Tahun 2022, realisasi anggaran belanja tersebut sebesar Rp114.920.064.002,00 atau 89,68%. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp25.220.156.078,96 atau 28,11% dibandingkan Realisasi Belanja Tahun 2021 sebesar Rp89.699.907.923,04. Adapun rincian anggaran dan belanja Dinas Sosial dan UPTD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Sosial dan UPTD**

No	Unit	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Dinas Sosial	83.066.708.004	76.075.258.325	91,58
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	6.604.119.097	5.672.222.427	85,89
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	5.811.362.100	5.247.180.740	90,29

4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	14.544.539.680	12.363.089.931	85,00
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	6.019.198.461	5.127.658.047	85,18
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	5.911.954.450	5.078.150.984	85,90
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	6.177.295.450	5.356.503.548	86,71
<b>Jumlah</b>		<b>128.135.177.242,00</b>	<b>114.920.064.002,00</b>	<b>89,68</b>

**3.1.2.1 Belanja Operasi** **Rp101.403.404.453,00** **Rp85.782.518.864,04**

Belanja Operasi Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp111.082.091.218,00 dan realisasi sebesar Rp101.403.404.453,00 atau 91,29%. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 mengalami kenaikan Rp15.620.885.588,96 atau 18,21% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tahun 2021 yaitu sebesar Rp85.782.518.864,04. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**3.1.2.1.1 Belanja Pegawai** **Rp39.900.047.351,00** **Rp35.638.179.721,00**

Belanja Pegawai Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp40.972.283.804,00 dan realisasi sebesar Rp39.900.047.351,00 atau 97,38% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>			
1	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>	<b>17.757.088.170,00</b>	<b>17.178.439.298,00</b>	<b>96,74</b>
	Belanja Gaji Pokok PNS	10.825.327.300,00	10.718.605.960,00	99,01
	Belanja Gaji Pokok PPPK	6.931.760.870,00	6.459.833.338,00	93,19
2	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>	<b>938.541.444,00</b>	<b>927.373.653,00</b>	<b>98,81</b>
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	932.727.104,00	922.185.141,00	98,87
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.814.340,00	5.188.512,00	89,24
3	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>	<b>436.100.000,00</b>	<b>415.845.000,00</b>	<b>95,36</b>
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	436.100.000,00	415.845.000,00	95,36
4	<b>Belanja Tunjangan Fungsional ASN</b>	<b>349.350.000,00</b>	<b>323.410.000,00</b>	<b>92,57</b>
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	349.350.000,00	323.410.000,00	92,57
5	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>	<b>354.624.625,00</b>	<b>346.475.000,00</b>	<b>97,70</b>
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	354.624.625,00	346.475.000,00	97,70
6	<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>	<b>597.682.260,00</b>	<b>593.699.160,00</b>	<b>99,33</b>
	Belanja Tunjangan Beras PNS	592.937.844,00	589.643.640,00	99,44
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.744.416,00	4.055.520,00	85,48
8	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>	<b>37.291.589,00</b>	<b>36.916.531,00</b>	<b>98,99</b>
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	37.291.589,00	36.916.531,00	98,99
8	<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>	<b>155.602,00</b>	<b>154.391,00</b>	<b>99,22</b>
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	153.502,00	153.502,00	100,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.100,00	889,00	42,33
9	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>	<b>1.217.793.949,00</b>	<b>1.114.368.404,00</b>	<b>91,51</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	973.629.875,00	892.907.400,00	91,71
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	244.164.074,00	221.461.004,00	90,70
10	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>	<b>36.070.165,00</b>	<b>35.291.967,00</b>	<b>97,84</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	22.760.160,00	21.982.480,00	96,58
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	13.310.005,00	13.309.487,00	100,00
11	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN</b>	<b>108.210.496,00</b>	<b>82.717.713,00</b>	<b>76,44</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	68.280.480,00	65.947.434,00	96,58
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	39.930.016,00	16.770.279,00	42,00
<b>Jumlah I</b>		<b>21.832.908.300,00</b>	<b>21.054.691.117,00</b>	<b>96,44</b>

<b>II</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>			
1	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>	<b>8.982.398.190,00</b>	<b>8.846.887.617,00</b>	<b>98,49</b>
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.457.254.992,00	7.321.978.601,00	98,19
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.525.143.198,00	1.524.909.016,00	99,98
2	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN</b>	<b>134.966.277,00</b>	<b>129.162.987,00</b>	<b>95,70</b>
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	134.966.277,00	129.162.987,00	95,70
3	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN</b>	<b>9.718.465.037,00</b>	<b>9.568.879.630,00</b>	<b>98,46</b>
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	8.193.321.839,00	8.043.970.614,00	98,18
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.525.143.198,00	1.524.909.016,00	99,98
<b>Jumlah II</b>		<b>18.835.829.504,00</b>	<b>18.544.930.234,00</b>	<b>98,46</b>
<b>III</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>			
1	<b>Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>14.526.000,00</b>	<b>14.526.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	14.526.000,00	14.526.000,00	100,00
2	<b>Belanja Honorarium</b>	<b>199.020.000,00</b>	<b>196.300.000,00</b>	<b>98,63</b>
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	199.020.000,00	196.300.000,00	98,63
3	<b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>89.600.000,00</b>	<b>99,56</b>
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	78.600.000,00	78.200.000,00	99,49
<b>Jumlah III</b>		<b>303.546.000,00</b>	<b>300.426.000,00</b>	<b>98,97</b>
<b>Jumlah I + II + III</b>		<b>40.972.283.804,00</b>	<b>39.900.047.351,00</b>	<b>97,38</b>

**3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa** **Rp53.813.470.492,00** **Rp44.935.913.478,04**

Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp61.833.407.414,00 dan realisasi sebesar Rp53.813.470.492,00 atau 87,03% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	<b>Belanja Barang</b>	<b>27.576.688.700,00</b>	<b>22.136.658.300,00</b>	<b>80,27</b>
	Belanja Barang Pakai Habis	27.255.562.700,00	21.821.579.400,00	80,06
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	321.126.000,00	315.078.900,00	98,12
II	<b>Belanja Jasa</b>	<b>26.786.443.200,00</b>	<b>24.966.507.172,00</b>	<b>93,21</b>
	Belanja Jasa Kantor	23.902.903.400,00	22.592.760.946,00	94,52
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.088.000,00	8.467.200,00	76,36
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.142.290.000,00	749.988.000,00	65,66
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	716.800.000,00	672.292.000,00	93,79
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.300.000,00	4.300.000,00	81,13
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	188.605.800,00	170.667.390,00	90,49
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	222.000.000,00	218.774.150,00	98,55
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	597.456.000,00	549.257.486,00	91,93

<b>III</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>4.238.210.514,00</b>	<b>3.747.035.765,00</b>	<b>88,41</b>
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	620.799.000,00	585.705.998,00	94,35
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.379.411.514,00	2.924.729.767,00	86,55
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	238.000.000,00	236.600.000,00	99,41
<b>IV</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.521.065.000,00</b>	<b>2.252.269.255,00</b>	<b>89,34</b>
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.521.065.000,00	2.252.269.255,00	89,34
<b>V</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>711.000.000,00</b>	<b>711.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	705.000.000,00	705.000.000,00	100,00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>61.833.407.414,00</b>	<b>53.813.470.492,00</b>	<b>87,03</b>

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Sosial dan UPTD sebagai berikut:

**Tabel 3. 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial dan UPTD**

No	Unit	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Dinas Sosial	30.959.149.450,00	27.003.290.030,00	87,22
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	6.183.960.417,00	5.256.198.191,00	85,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	3.685.465.100,00	3.366.981.575,00	91,36
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	7.639.987.050,00	6.690.793.481,00	87,58
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSRR)	3.564.865.497,00	2.976.672.583,00	83,50
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	4.040.526.450,00	3.571.717.084,00	88,40
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	5.759.453.450,00	4.947.817.548,00	85,91
<b>Jumlah</b>		<b>61.833.407.414,00</b>	<b>53.813.470.492,00</b>	<b>87,03</b>

### **3.1.2.2 Belanja Hibah** **Rp1.064.486.610,00** **Rp812.425.665,00**

Belanja Hibah Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.135.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.064.486.610,00 atau 93,74% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
<b>A</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>			
I	<b>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>276.600.000,00</b>	<b>276.600.000,00</b>	<b>100</b>
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	276.600.000,00	276.600.000,00	100
II	<b>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>100</b>

	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	47.000.000,00	47.000.000,00	100
III	<b>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>812.000.000,00</b>	<b>740.886.610,00</b>	<b>91,24</b>
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	263.000.000,00	238.000.000,00	90,49
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	549.000.000,00	502.886.610,00	91,6
<b>Jumlah</b>		<b>1.135.600.000,00</b>	<b>1.064.486.610,00</b>	<b>93,74</b>

Belanja Hibah Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 terdiri dari hibah uang dengan anggaran Rp586.600.000,00 dengan realisasi Rp561.600.000,00 atau 95,73%. Sisa anggaran senilai Rp25.000.000,00 tidak terealisasi kerena penerima yaitu Lembaga Orang Tua Asuh (LOTA) sudah menerima hibah dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Serta hibah barang yang bersumber dari Dana Keistimewaan dengan anggaran Rp549.000.000,00 dan realisasi Rp502.886.610,00 atau 91,60%, sisa anggaran merupakan sisa lelang pengadaan barang. Rincian belanja hibah sebagai berikut:

**Tabel 3. 7 Rincian Hibah Dinas Sosial**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Hibah Uang	586.600.000,00	561.600.000,00	95,73
2	Hibah Barang	549.000.000,00	502.886.610,00	91,60
<b>Jumlah</b>		<b>1.135.600.000,00</b>	<b>1.064.486.610,00</b>	<b>93,73</b>

Adapun rincian penerima hibah Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 8 Rincian Penerima Hibah**

No	Penerima Hibah	Nilai (Rp)
A	<b>Hibah Uang</b>	
1	Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta - Jl. Sriti No 20 A, Demangan Baru, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman 55281	176.600.000,00
2	Komda Lansia DIY - Gedhong Indische, Kepatihan Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta	100.000.000,00
3	Rumah Singgah Anak Mandiri - Jl. Perintis Kemerdekaan No 33 B	7.000.000,00
4	Yayasan Panti Asuhan Anak Balita Gotong Royong - Jaranan RT 06 Panggungharjo Sewon Bantul	20.000.000,00
5	Yayasan Sayap Ibu - Jl. Rajawali No. 3 Pringwulung Condongcatur Depok Sleman	20.000.000,00
6	LKSA Yayasan Realino Seksi Pengabdian Masyarakat - Jl. Mataram No. 66, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Yogyakarta 55213	7.000.000,00
7	Rumah Anak Indonesia - Ds. Kalajir Lor RT. 07/ RW. 13 Kel. Kalitirto, Kec. Berbah, Sleman	7.000.000,00
8	Rumah Singgah Ahmad Dahlan - Jl. Sidobali UH II/ 396 Yogyakarta	7.000.000,00
9	Rumah Singgah Diponegoro - Tapan, Jl. Ambar Rejo, Denokan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta	7.000.000,00
10	Yayasan Hafara - Gonjen RT. 005/ Tamantirto Kasihan Bantul	7.000.000,00
11	Yayasan Indriya-Nati - Pujokusuman MG I/382 Yogyakarta 55282	7.000.000,00
12	Yayasan Lembaga Perlindungan Anak - Jl. Kapas No. 11 Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman	45.000.000,00
13	Yayasan Rumah Impian - Jl. Kenanga no 33 RT 04/ RW 01 Juwangen	7.000.000,00
14	Yayasan Satu Nama - Jl. Sambisari No. 99, Duwet, Sendangadi, Kec. Mlati , Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	7.000.000,00
15	LKK "BK3S" Prov DIY - Badran Gg Melati JT I/704 Jetis YK	50.000.000,00

16	Karang Taruna DIY - Jl. Timoho Regency Kav A-3 Muja Muju YK	50.000.000,00
17	LK3 "Teratai" Provinsi DIY - Jl. Lempuyangan No. 1 YK	12.000.000,00
18	LKS Mugi Waras Sumbersari - Blendung, Sumbersati Moyudan Sleman	5.000.000,00
19	LKS Sekaringtyas - Komplek Balai Kalurahan Banguntapan Jl. Gedong Kuning No. 170 Banguntapan Bantul	5.000.000,00
20	Orsos As-Salaam - Wirosutan, Srigading, Sanden, Bantul	5.000.000,00
21	Orsos "Langgeng" - Komplek Kalurahan Kebonrejo, Temon, Kulon Progo	5.000.000,00
22	Orsos Mekar Sari - Beji, Patuk, Gunungkidul	5.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>561.600.000,00</b>
<b>B</b>	<b>Hibah Barang (Dana Keistimewaan)</b>	
1	KUBE Lestari Budaya Batik Ecoprint Ron Rinonce	35.930.700,00
2	Kube Lestari Budaya Batik Tulis Sekar Kawung Bangunkerto, Turi, Sleman	31.202.100,00
3	Kube Lestari Budaya Batik Tulis dan Shibori, Banyuraden, Gamping, Sleman	22.343.190,00
4	Kube Lestari Budaya Batik Tulis Pinilih, Tepus, Gunungkidul	35.181.450,00
5	Kube Lestari Budaya Batik Tulis Triwidadi, Pajangan, Bantul	36.297.000,00
6	Kube Lestari Budaya Jathilan Cipto Wiloho, Tamanmartani, Kalasan, Sleman	31.529.550,00
7	Kube Lestari Budaya Jathilan Tri Mudo Laras, Kaliagung, Sentolo, KP	36.563.400,00
8	Kube Lestari Budaya jathilan Turonggo Mudho Budhoyo, Panggungharjo, Sewon, Bantul	35.131.500,00
9	KUBE Lestari Budaya Kipo Kota Yogyakarta	33.913.830,00
10	Kube Lestari Budaya Makanan Tradisional Suko Mandiri, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman	29.079.780,00
11	Kube Lestari Budaya Pelelah Pisang, Ngupo, Nglindur, Girisubo, Gunungkidul	34.832.910,00
12	Kube Lestari Budaya Perak Purbo Makmur Sejahtera Kotagede	35.179.230,00
13	KUBE Lestari Budaya Sekar Arum Kepek, Semin, Gunung Kidul	35.187.000,00
14	KUBE Lestari Budaya Sekar Mudho Sembodo, Bunder 2, Banaran, Galur, KP	34.487.700,00
15	Kube Lestari Budaya Thiwul Manis Setia, Bleberan, GK	36.027.270,00
<b>Jumlah</b>		<b>502.886.610,00</b>
<b>Total Hibah</b>		<b>1.064.486.610,00</b>

### 3.1.2.3 Belanja Bantuan Sosial Rp6.625.400.000,00 Rp4.396.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.140.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.625.400.000,00 atau 92,78% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu</b> Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	<b>3.554.400.000,00</b>	<b>3.039.000.000,00</b>	<b>85,50</b>
II	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)</b> Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	<b>3.586.400.000,00</b>	<b>3.586.400.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah</b>		<b>7.140.800.000,00</b>	<b>6.625.400.000,00</b>	<b>92,78</b>

Realisasi belanja bantuan sosial Dinas Sosial terdiri belanja bantuan sosial kepada individu yaitu penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dengan anggaran senilai Rp958.800.000,00

dan realisasi Rp956.400.000,00. Bantuan Sosial Penanganan Dampak Inflasi anggaran senilai Rp2.595.600.000,00 dengan realisasi Rp2.082.600.000,00 atau 80,23%. Sisa anggaran tidak terealisasi karena calon penerima setelah dilakukan verifikasi tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial, diantaranya merupakan penerima bantuan sosial lain dari APBN (PKH, BLT Sembako, BLT BBM). Bantuan sosial melalui Lembaga dengan anggaran Rp3.586.400.000,00 dan realisasi Rp3.586.400.000,00 atau 100%. Adapun rincian penerima bantuan sosial sebagai berikut:

**Tabel 3. 10 Rincian Penerima Bantuan Sosial**

**A. Penerima Bantuan Sosial – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)**

No	Nama Kab/Kota	Nama PT	Jumlah Penerima	Jumlah Bantuan Per Orang (Rp)	Total (Rp)
1	Sleman	PT. MITRA ADI JAYA - Gedong Kuning km 6 , Kalitirto, Berbah, Sleman	378	600.000,00	226.800.000,00
2	Kulon Progo	PT. PUTRA PATRIA ADIKARSA - Jl. Pahlawan KM 01 No.74 Giripeni, Wates, Kulon Progo	426	600.000,00	255.600.000,00
3	Bantul	PT. YOGYAKARTA TEMBAKAU INDONESIA - Jl. Imogiri Barat No.KM.4, Wojo, Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188	790	600.000,00	474.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.594</b>		<b>956.400.000,00</b>

**B. Penerima Bantuan Sosial – Penanganan Dampak Inflasi**

No	Nama Kab/ Kota	Jenis Pekerjaan			Jumlah Total Penerima	Jumlah Bantuan Per Orang (Rp)	Total (Rp)
		Buruh, Peternak dan Petani/ Perkebunan	UMKM	Nelayan			
1	Sleman	646	69	-	715	900.000,00	643.500.000,00
2	Kulon Progo	235	92	133	460	900.000,00	414.000.000,00
3	Bantul	101	60	97	258	900.000,00	232.200.000,00
4	Gunungkidul	611	23	142	776	900.000,00	698.400.000,00
5	Kota Yogyakarta	1	104	-	105	900.000,00	94.500.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>2.314</b>		<b>2.082.600.000,00</b>

**C. Penerima Bantuan Sosial Melalui Lembaga Non Pemerintah**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>			
a	<b>Penyediaan Permakanan</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	LKSA Krida Mulya	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00
2	LKSA Wiyata Darma 1	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00
3	LKSA Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (Yaketunis)	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
4	PA Bina Siwi	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
5	Marsudi Putra II	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
b	<b>Penyediaan Sandang</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	PA Bina Siwi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2	LKSA Krida Mulya	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
3	Marsudi Putra II	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
4	LKSA Wiyata Darma 1	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
5	LKSA Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (Yaketunis)	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
c	<b>Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	LKSA Krida Mulya	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00

2	LKSA Wiyata Darma 1	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
3	LKSA Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (Yaketunis)	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
4	Marsudi Putra II	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5	PA Bina Siwi	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
<b>d</b>	<b>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	PA Bina Siwi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2	LKSA Krida Mulya	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
3	LKSA Wiyata Darma 1	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
4	LKSA Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (Yaketunis)	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
5	Marsudi Putra II	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
<b>e</b>	<b>Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	PA Bina Siwi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
2	LKSA Krida Mulya	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00
3	LKSA Wiyata Darma 1	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00
4	Marsudi Putra II	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5	LKSA Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (Yaketunis)	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
<b>Jumlah I</b>		<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti</b>			
<b>a</b>	<b>Penyediaan Makanan</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	LKSA Mustika Tama	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
2	LKSA Rumah Alesha Panti Qurani	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
3	TAS Annisa	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
4	TAS An Nur Cahaya Umat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
5	TAS Assalam	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
6	TAS Qonita	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
7	TAS Syifaul Qulub	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
8	TPA Beringharjo	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
9	Almarina	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
10	LKSA Abdul Alim	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
11	LKSA Al Barokah Prambanan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
12	LKSA Al Barokah Jogokerten Sleman	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
13	LKSA Al Ghifari	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
14	LKSA Al Hikmah	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
15	LKSA Al Ikhlas	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
16	LKSA Al Islam	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
17	LKSA Amanah	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
18	LKSA Ash Siddiqiyah	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
19	LKSA Bina Insani	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
20	LKSA Bina Putra	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
21	LKSA Binnausaadah	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
22	LKSA Bintan Sa'adilah Arrosyid	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
23	LKSA Darul Aitam	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
24	LKSA Darul Ilmi	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
25	LKSA Darussubusi	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
26	LKSA Diponegoro	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
27	LKSA Islam Playen	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
28	LKSA Mambaul Hisan	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
29	LKSA Mekar Melati	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
30	LKSA Muhammadiyah Nanggulan	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
31	LKSA Muhammadiyah Wates	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
32	LKSA Nur Fadhilah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
33	LKSA Nurul Haq Madhania	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
34	LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Al Amin	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
35	LKSA Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
36	LKSA Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
37	LKSA PAY Putra Islam Giwangan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
38	LKSA PAY Putra Muhammadiyah Yogyakarta	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00
39	LKSA Rumah Sejahtera	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
40	LKSA Sang Timur	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00

41	LKSA Santa Maria	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
42	LKSA Santo Thomas	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
43	LKSA Tunas Harapan Bala Keselamatan Yogyakarta	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
44	LKSA YAPITU Al Huda Pucung	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
45	LKSA Yayasan Panti Asuhan Islam Ibadah Bunda	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00
46	LKSA Yayasan Panti Asuhan Yatim Putri Islam RM Suryowinoto	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
47	LKSA Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
48	LKSA Zuhriyah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
49	LKS ABH Prawoto	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
50	Yayasan Sahabat Manusia Pembutuh Cinta (Yayasan Hamba)	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
<b>b</b>	<b>Penyediaan Sandang</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	LKSA Mustika Tama	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
2	LKSA Rumah Alesha Panti Qurani	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
3	TAS Annisa	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
4	TAS An Nur Cahaya Umat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5	TAS Assalam	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
6	TAS Qonita	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
7	TAS Syifaул Qulub	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
8	TPA Beringharjo	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
9	Almarina	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
10	LKSA Abdul Alim	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
11	LKSA Al Barokah Prambanan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
12	LKSA Al Barokah Jogokerten Sleman	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
13	LKSA Al Ghifari	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
14	LKSA Al Hikmah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
15	LKSA Al Ikhlas	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
16	LKSA AL ISLAM	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
17	LKSA Amanah	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
18	LKSA Ash Siddiqiyah	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
19	LKSA Bina Insani	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
20	LKSA Bina Putra	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
21	LKSA Binnausaadah	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
22	LKSA Bintan Sa"adilah Arrosyid	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
23	LKSA Darul Aitam	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
24	LKSA Darul Ilmi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
25	LKSA Darussubusi	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
26	LKSA Diponegoro	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
27	LKSA Islam Playen	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
28	LKSA Mambaul Hisan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
29	LKSA Mekar Melati	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
30	LKSA Muhammadiyah Nanggulan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
31	LKSA Muhammadiyah Wates	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
32	LKSA Nur Fadhilah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
33	LKSA Nurul Haq Madhania	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
34	LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Al Amin	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
35	LKSA Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
36	LKSA Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
37	LKSA PAY Putra Islam Giwangan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
38	LKSA PAY Putra Muhammadiyah Yogyakarta	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
39	LKSA Rumah Sejahtera	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
40	LKSA Sang Timur	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
41	LKSA Santa Maria	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
42	LKSA Santo Thomas	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
43	LKSA Tunas Harapan Bala Keselamatan Yogyakarta	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
44	LKSA YAPITU Al Huda Pucung	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
45	LKSA Yayasan Panti Asuhan Islam Ibadah Bunda	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
46	LKSA Yayasan Panti Asuhan Yatim Putri Islam RM Suryowinoto	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
47	LKSA Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
48	LKSA Zuhriyah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00

49	LKS ABH Prawoto	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
50	Yayasan Sahabat Manusia Pembutuh Cinta (Yayasan Hamba)	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
<b>c</b>	<b>Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	LKSA Mustika Tama	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
2	LKSA Rumah Alesha Panti Qurani	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
3	TAS Annisa	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
4	TAS An Nur Cahaya Umat	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5	TAS Assalam	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
6	TAS Qonita	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
7	TAS Syifaул Qulub	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
8	TPA Beringharjo	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
9	Almarina	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
10	LKSA Abdul Alim	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
11	LKSA Al Barokah Prambanan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
12	LKSA Al Barokah Jogokerten Sleman	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
13	LKSA Al Ghifari	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
14	LKSA Al Hikmah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
15	LKSA Al Ikhlas	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
16	LKSA Al Islam	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
17	LKSA Amanah	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
18	LKSA Ash Siddiqiyah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
19	LKSA Bina Insani	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
20	LKSA BINA PUTRA	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
21	LKSA Binnausaadah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
22	LKSA Bintan Sa"adilah Arrosyid	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
23	LKSA Darul Aitam	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
24	LKSA Darul Ilmi	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
25	LKSA Darussubusi	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
26	LKSA Diponegoro	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
27	LKSA Islam Playen	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
28	LKSA Mambaul Hisan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
29	LKSA Mekar Melati	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
30	LKSA Muhammadiyah Nanggulan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
31	LKSA Muhammadiyah Wates	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
32	LKSA Nur Fadhilah	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
33	LKSA Nurul Haq Madhania	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
34	LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Al Amin	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
35	LKSA Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
36	LKSA Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
37	LKSA PAY Putra Islam Giwangan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
38	LKSA PAY Putra Muhammadiyah Yogyakarta	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
39	LKSA Rumah Sejahtera	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
40	LKSA Sang Timur	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
41	LKSA Santa Maria	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
42	LKSA Santo Thomas	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
43	LKSA Tunas Harapan Bala Keselamatan Yogyakarta	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
44	LKSA YAPITU Al Huda Pucung	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
45	LKSA Yayasan Panti Asuhan Islam Ibadah Bunda	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00
46	LKSA Yayasan Panti Asuhan Yatim Putri Islam RM Suryowinoto	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
47	LKSA Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
48	LKSA Zuhriyah	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
49	LKS ABH Prawoto	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
50	Yayasan Sahabat Manusia Pembutuh Cinta (Yayasan Hamba)	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
<b>d</b>	<b>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	LKSA Mustika Tama	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
2	LKSA Rumah Alesha Panti Qurani	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
3	TAS Annisa	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
4	TAS An Nur Cahaya Umat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5	TAS Assalam	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00

6	TAS Qonita	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
7	TAS Syifaул Qulub	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
8	TPA Beringharjo	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
9	Almarina	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
10	LKSA Abdul Alim	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
11	LKSA Al Barokah Prambanan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
12	LKSA Al Barokah Jogokerten Sleman	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
13	LKSA Al Ghifari	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
14	LKSA Al Hikmah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
15	LKSA Al Ikhlas	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
16	LKSA Al Islam	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
17	LKSA Amanah	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
18	LKSA Ash Siddiqiyah	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
19	LKSA Bina Insani	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
20	LKSA Bina Putra	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
21	LKSA Binnausaadah	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
22	LKSA Bintan Sa"adilah Arrosyid	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
23	LKSA Darul Aitam	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
24	LKSA Darul Ilmi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
25	LKSA Darussubusi	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
26	LKSA Diponegoro	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
27	LKSA Islam Playen	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
28	LKSA Mambaul Hisan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
29	LKSA Mekar Melati	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
30	LKSA Muhammadiyah Nanggulan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
31	LKSA Muhammadiyah Wates	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
32	LKSA Nur Fadhilah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
33	LKSA Nurul Haq Madhania	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
34	LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Al Amin	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
35	LKSA Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
36	LKSA Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
37	LKSA PAY Putra Islam Giwangan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
38	LKSA PAY Putra Muhammadiyah Yogyakarta	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
39	LKSA Rumah Sejahtera	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
40	LKSA Sang Timur	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
41	LKSA Santa Maria	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
42	LKSA Santo Thomas	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
43	LKSA Tunas Harapan Bala Keselamatan Yogyakarta	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
44	LKSA YAPITU Al Huda Pucung	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
45	LKSA Yayasan Panti Asuhan Islam Ibadah Bunda	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
46	LKSA Yayasan Panti Asuhan Yatim Putri Islam RM Suryowinoto	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
47	LKSA Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
48	LKSA Zuhriyah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
49	LKS ABH Prawoto	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
50	Yayasan Sahabat Manusia Pembutuh Cinta (Yayasan Hamba)	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
<b>e</b>	<b>Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	LKSA Mustika Tama	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
2	LKSA Rumah Alesha Panti Qurani	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
3	TAS Annisa	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
4	TAS An Nur Cahaya Umat	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5	TAS Assalam	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
6	TAS Qonita	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
7	TAS Syifaул Qulub	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
8	TPA Beringharjo	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
9	Almarina	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00
10	LKSA Abdul Alim	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
11	LKSA Al Barokah Prambanan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
12	LKSA Al Barokah Jogokerten Sleman	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
13	LKSA Al Ghifari	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

14	LKSA Al Hikmah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
15	LKSA Al Ikhlas	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
16	LKSA Al Islam	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
17	LKSA Amanah	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
18	LKSA Ash Siddiqiyah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
19	LKSA Bina Insani	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
20	LKSA Bina Putra	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
21	LKSA Binnausaadah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
22	LKSA Bintan Sa"adilah Arrosyid	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
23	LKSA Darul Aitam	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
24	LKSA Darul Ilmi	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
25	LKSA Darussubusi	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
26	LKSA Diponegoro	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
27	LKSA Islam Playen	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
28	LKSA Mambaul Hisan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
29	LKSA Mekar Melati	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
30	LKSA Muhammadiyah Nanggulan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
31	LKSA Muhammadiyah Wates	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
32	LKSA Nur Fadhilah	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
33	LKSA Nurul Haq Madhania	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
34	LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Al Amin	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
35	LKSA Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
36	LKSA Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
37	LKSA PAY Putra Islam Giwangan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
38	LKSA PAY Putra Muhammadiyah Yogyakarta	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
39	LKSA Rumah Sejahtera	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
40	LKSA Sang Timur	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
41	LKSA Santa Maria	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
42	LKSA Santo Thomas	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
43	LKSA Tunas Harapan Bala Keselamatan Yogyakarta	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
44	LKSA YAPITU Al Huda Pucung	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
45	LKSA Yayasan Panti Asuhan Islam Ibadah Bunda	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
46	LKSA Yayasan Panti Asuhan Yatim Putri Islam RM Suryowinoto	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
47	LKSA Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
48	LKSA Zuhriyah	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
49	LKS ABH Prawoto	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
50	Yayasan Sahabat Manusia Pembutuh Cinta (Yayasan Hamba)	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
<b>Jumlah II</b>		<b>1.200.000.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>			
<b>a</b>	<b>Penyediaan Permakanan</b>			
	- Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	LKS Budhi Mulya	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
2	Orsos Adhi Yuswo	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
3	Klp. LU Setaman	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
4	Klp. LU Mulya Abadi	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
5	LKS Cempaka Sidomulyo	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
6	LKS Sekaringtyas	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
7	Posyandu LU Khusnul Khotimah	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
8	LKS Ismoyo	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
9	Orsos Melati	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
10	LKS Sedyo Rahayu	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
11	Komdes Wukirsari	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
12	Orsos As-Salaam	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
13	Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa Madania	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00
14	LKS. Maju Sejahtera	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
15	LKS Abdi Pelangi Nusantara	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
16	Klp. LU Pendowo Maju	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
17	Klp. LU Tresno Mulya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00

18	Orsos "Langgeng"	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
19	LKS. Baitunnajah	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
20	Klp. Lansia Sedulur	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
21	Yysn. Bina Insan Madani	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
22	Klp. LU Mulya Sejati	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
23	Klp. LU Sari Manunggal	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
24	LKS Kinasih	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
25	Paguyuban Lansia Bhakti Wreda	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
26	Orsos Ngudi Mulyo	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
27	LKS Laku Utomo	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
28	Orsos Guyub	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
29	Orsos Setyo Manunggal	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
30	Orsos Mekar Sari	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00
31	LKS Al Marina	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
32	LKS. Raharja	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
33	Orsos Melati Sleman	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
34	LKS Pelita Kasih	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
35	LKS Suko Manunggal	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
36	LKS BKM Taman Sejahtera	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
37	LKS. Tirtowening	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
38	Yysn Karya Mitra Sejahtera	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
	<b>- Bantuan Sosial Fasilitasi Lanjut Usia melalui Home Care</b>	<b>491.400.000,00</b>	<b>491.400.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	LKS Cempaka Sidomulyo	70.200.000,00	70.200.000,00	100,00
2	LKS. Maju Sejahtera	28.080.000,00	28.080.000,00	100,00
3	Orsos "Langgeng"	70.200.000,00	70.200.000,00	100,00
4	LKS Laku Utomo	70.200.000,00	70.200.000,00	100,00
5	Orsos Mekar Sari	28.080.000,00	28.080.000,00	100,00
6	LKS. Raharja	35.100.000,00	35.100.000,00	100,00
7	Orsos Melati Sleman	70.200.000,00	70.200.000,00	100,00
8	LKS Mugi Waras	28.080.000,00	28.080.000,00	100,00
9	BKL Manunggal Asih	28.080.000,00	28.080.000,00	100,00
10	BKL Tunas Mekar	28.080.000,00	28.080.000,00	100,00
11	LKS BKM Taman Sejahtera	35.100.000,00	35.100.000,00	100,00
<b>b</b>	<b>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial</b>			
	<b>- Bantuan Sosial Fasilitasi Lanjut Usia melalui Home Care</b>	<b>420.000.000,00</b>	<b>420.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	LKS Cempaka Sidomulyo	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
2	LKS. Maju Sejahtera	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
3	Orsos "Langgeng"	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
4	LKS Laku Utomo	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
5	Orsos Mekar Sari	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
6	LKS. Raharja	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
7	Orsos Melati Sleman	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
8	LKS Mugi Waras	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
9	BKL Manunggal Asih	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
10	BKL Tunas Mekar	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
11	LKS BKM Taman Sejahtera	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
<b>c</b>	<b>Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari</b>			
	<b>- Bantuan Family Support bagi Lanjut Usia</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	LKS Kinasih	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00
2	Orsos Melati Sleman	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00
<b>Jumlah III</b>		<b>2.246.400.000,00</b>	<b>2.246.400.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah I + II + III</b>		<b>3.586.400.000,00</b>	<b>3.586.400.000,00</b>	<b>100,00</b>

**3.1.2.4 Belanja Modal** **Rp13.516.659.549,00** **Rp3.917.389.059,00**

Realisasi Belanja Modal Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp13.516.659.549,00 atau 79.29% dari anggaran sebesar Rp17.053.086.024,00. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 mengalami

kenaikan sebesar Rp9.599.270.490,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2021 yaitu sebesar Rp3.917.389.059,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

<b>3.1.2.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp2.945.891.021,00</b>	<b>Rp676.437.400,00</b>
----------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.050.037.016,00 dan realisasi sebesar Rp2.945.891.021,00 atau 96,59% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Belanja Modal Alat Bantu	483.984.000	454.720.794,00	93,95
2	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	2.508.000	2.508.000,00	100,00
3	Belanja Modal Alat Kantor	367.476.000	335.591.768,00	91,32
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	952.381.200	923.775.760,00	97,00
5	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.300.000	5.300.000,00	100,00
6	Belanja Modal Alat Studio	94.346.136	92.226.799,00	97,75
7	Belanja Modal Alat Komunikasi	41.956.000	40.493.910,00	96,52
8	Belanja Modal Alat Kedokteran	102.210.000	101.440.000,00	99,25
9	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	198.530.000	197.500.000,00	99,48
10	Belanja Modal Komputer Unit	494.119.680	489.573.995,00	99,08
11	Belanja Modal Peralatan Komputer	247.724.000	243.557.995,00	98,32
12	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	35.202.000	35.202.000,00	100,00
13	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	24.300.000	24.000.000,00	98,77
<b>Jumlah</b>		<b>3.050.037.016,00</b>	<b>2.945.891.021,00</b>	<b>96,59</b>

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosial dan UPTD sebagai berikut:

**Tabel 3. 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Dinas Sosial dan UPTD**

No	Unit	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Dinas Sosial	455.363.000	444.095.757	97,53
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	323.724.680	322.059.000	99,49
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	189.257.000	187.573.000	99,11
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	430.702.000	419.443.901	97,39
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	752.310.336	691.341.363	91,90
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	545.438.000	536.792.000	98,41
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	353.242.000	344.586.000	97,55
<b>Jumlah</b>		<b>3.050.037.016,00</b>	<b>2.945.891.021,00</b>	<b>96,59</b>

<b>3.1.2.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp10.289.325.892,00</b>	<b>Rp3.220.290.859,00</b>
----------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp13.716.678.008,00 dan realisasi sebesar Rp10.289.325.892,00 atau 75,01% dengan rincian sebagai

berikut:

**Tabel 3. 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.147.216.653	4.907.174.393	68,66
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.195.101.355	5.013.252.099	80,92
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	374.360.000	368.899.400	98,54
<b>Jumlah</b>		<b>13.716.678.008</b>	<b>10.289.325.892</b>	<b>75,01</b>

Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Sosial dan UPTD sebagai berikut:

**Tabel 3. 14 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Dinas Sosial dan UPTD**

No	Unit	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Dinas Sosial (Induk)	2.547.314.750,00	1.179.486.577,00	46,30
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	-	-	-
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	1.854.360.000,00	1.611.746.165,00	86,92
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	6.433.470.630,00	5.212.472.549,00	81,02
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	1.641.202.628,00	1.398.824.101,00	85,23
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	1.240.330.000,00	886.796.500,00	71,50
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>13.716.678.008,00</b>	<b>10.289.325.892,00</b>	<b>75,01</b>

#### **3.1.2.4.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi** Rp171.612.000,00 Rp0,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp173.337.000,00 dan realisasi sebesar Rp171.612.000,00 atau 99,00% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Belanja Modal Jembatan	50.000.000,00	49.000.000,00	98,00
2	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	65.637.000,00	65.412.000,00	99,66
3	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00
4	Belanja Modal Jaringan Air Minum	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00
<b>Jumlah</b>		<b>173.337.000,00</b>	<b>171.612.000,00</b>	<b>99,00</b>

Adapun rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Sosial dan UPTD sebagai berikut:

**Tabel 3. 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi di Dinas Sosial dan UPTD**

No	Unit	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Dinas Sosial	73.337.000,00	73.112.000,00	99,69
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	-	-	-
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	50.000.000,00	49.000.000,00	98,00
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	-	-	-

5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
6	Balai Rehabilitasi san Pengasuhan Anak (BRSPA)	-	-	-
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	25.000.000,00	24.500.000,00	98,00
	Jumlah	<b>173.337.000,00</b>	<b>171.612.000,00</b>	<b>99,00</b>

**3.1.2.4.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** **Rp109.830.636,00** **Rp20.660.800,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp113.034.000,00 dan realisasi sebesar Rp109.830.636,00 atau 97,17% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	3.874.000,00	3.874.000,00	100,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	109.160.000,00	105.956.636,00	97,07
	Jumlah	<b>113.034.000,00</b>	<b>109.830.636,00</b>	<b>97,17</b>

Adapun rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Sosial Induk dan UPTD sebagai berikut:

**Tabel 3. 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di Dinas Sosial dan UPTD**

No	Unit	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Dinas Sosial	-	-	-
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	63.434.000,00	63.045.236,00	99,39
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	-	-	-
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	-	-	-
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	-	-	-
6	Balai Rehabilitasi san Pengasuhan Anak (BRSPA)	49.600.000,00	46.785.400,00	94,33
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	-	-	-
	Jumlah	<b>113.034.000,00</b>	<b>109.830.636,00</b>	<b>97,17</b>

**3.1.2.4.6 Belanja Modal Aset Lainnya** **Rp0,00** **Rp0,00**

Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

**3.1.2.5 Belanja Dana Keistimewaan** **Rp5.831.322.270,00** **Rp5.526.693.473,84**

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp128.135.177.242,00 dan realisasi sebesar Rp114.920.064.002,00 di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber dananya dari Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada tahun 2022 yaitu: anggaran sebesar Rp6.184.871.500,00 dan realisasi sebesar Rp5.831.322.270,00 atau 94,28%,

dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
a	Belanja Barang dan Jasa	5.635.871.500,00	5.328.435.660,00	94,55
b	Belanja Hibah	549.000.000,00	502.886.610,00	91,60
	Jumlah	<b>6.184.871.500,00</b>	<b>5.831.322.270,00</b>	<b>94,28</b>

### 3.2. RINCIAN DAN PENJELASAN NERACA

	2022	2021 (Audited)
<b>3.2.1 Aset</b>	<b>Rp106.693.648.919,64</b>	<b>Rp95.259.735.237,19</b>
<b>3.2.1.1 Aset Lancar</b>	<b>Rp1.219.893.982,55</b>	<b>Rp1.591.490.540,00</b>
<b>3.2.1.1.1 Persediaan</b>	<b>Rp1.219.893.982,55</b>	<b>Rp1.591.490.540,50</b>

Saldo Persediaan sebesar Rp1.219.893.982,55 terdiri dari persediaan barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 20 Rincian Saldo Persediaan Dinas Sosial**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Bahan Kimia	10.110.000,00	3.062.410,00
2	Bahan Bakar dan Pelumas	90.548.700,00	67.795.750,00
3	Isi Tabung Gas	3.649.000,00	310.000,00
4	Bahan Lainnya	82.545.285,50	890.458.984,50
5	Suku Cadang Alat Angkutan	2.147.000,00	961.000,00
6	Suku Cadang Alat Bengkel	-	3.372.000,00
7	Alat Tulis Kantor	30.780.705,15	24.424.950,00
8	Kertas dan Cover	10.244.600,00	8.334.000,00
9	Bahan Cetak	5.479.000,00	335.750,00
10	Benda Pos	740.000,00	170.000,00
11	Bahan Komputer	3.076.700,00	1.453.000,00
12	Perabot Kantor	43.392.000,00	60.292.000,00
13	Alat Listrik	47.570.091,90	36.922.125,00
14	Perlengkapan Dinas	330.000,00	1.655.500,00
15	Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.145.000,00	561.000,00
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	752.383.125,00	485.112.636,60
17	Obat	33.797.075,00	2.933.570,00
18	Natura	100.955.700,00	3.335.864,40
	<b>Jumlah</b>	<b>1.219.893.982,55</b>	<b>1.591.490.540,50</b>

Adapun rincian Saldo Persediaan pada Dinas Sosial dan UPTD sebagai berikut:

**Tabel 3. 21 Saldo Persediaan di Dinas Sosial dan UPTD**

No	Unit	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Sosial	387.436.150,00	975.323.690,00
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	483.636.288,65	370.132.674,50

3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	36.247.476,00	27.051.880,00
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	244.366.653,00	192.295.790,00
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	53.649.491,90	12.971.225,00
6	Balai Rehabilitasi san Pengasuhan Anak (BRSPA)	6.668.800,00	6.168.750,00
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	7.889.123,00	7.546.531,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.219.893.982,55</b>	<b>1.591.490.540,50</b>

	<b>2022</b>	<b>2021 (audited)</b>
<b>3.2.1.2 Aset Tetap</b>	<b>Rp105.123.987.595,59</b>	<b>Rp93.428.501.612,69</b>

Aset Tetap Dinas Sosial per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp105.123.987.595,59 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp161.062.691.973,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp55.938.704.377,41 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 22 Aset Tetap Dinas Sosial**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Tanah	18.705.829.406,00	18.705.829.406,00
2	Peralatan dan Mesin	30.096.043.362,06	28.319.319.398,00
3	Gedung dan Bangunan	109.000.697.502,00	97.464.049.920,82
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.258.005.395,94	1.715.679.679,50
5	Aset Tetap Lainnya	635.210.807,00	579.686.587,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	366.905.500,00	337.655.500,00
7	Akumulasi Penyusutan	(55.938.704.377,41)	(53.693.718.878,63)
<b>Jumlah</b>		<b>105.123.987.595,59</b>	<b>93.428.501.612,69</b>

<b>3.2.1.2.1 Tanah</b>	<b>Rp18.705.829.406,00</b>	<b>Rp18.705.829.406,00</b>
------------------------	----------------------------	----------------------------

Saldo Aset Tetap Tanah sebesar Rp18.705.829.406,00 diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 3. 23 Rincian Aset Tetap - Tanah**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Tanah	18.705.829.406,00	18.705.829.406,00
<b>Jumlah</b>		<b>18.705.829.406,00</b>	<b>18.705.829.406,00</b>

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial dan UPTD sebagai berikut:

**Tabel 3. 24 Rincian Tanah Dinas Sosial dan UPTD**

No	Unit	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Sosial	13.402.876.916,00	13.402.876.916,00
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	0,00	0,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	42.584.000,00	42.584.000,00
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	3.706.896.000,00	3.706.896.000,00
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	20.073.650,00	20.073.650,00
6	Balai Rehabilitasi san Pengasuhan Anak (BRSPA)	1.326.722.840,00	1.326.722.840,00
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	206.676.000,00	206.676.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>18.705.829.406,00</b>	<b>18.705.829.406,00</b>

Mutasi Tanah sebagai berikut:

**Tabel 3. 25 Mutasi Tanah**

No	Uraian	2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		2022 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	18.705.829.406,00	0,00	0,00	18.705.829.406,00
	Jumlah	<b>18.705.829.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.705.829.406,00</b>

Selama tahun 2022 tidak ada penambahan atau pengurangan aset tanah Dinas Sosial.

**3.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin** **Rp30.096.043.362,06** **Rp28.319.319.398,00**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp30.096.043.362,06 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3. 26 Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Alat Besar	1.377.126.000,00	1.091.334.000,00
2	Alat Angkutan	6.728.210.454,31	7.220.220.408,31
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	843.146.020,00	680.253.520,00
4	Alat Pertanian	220.780.944,00	192.531.944,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.675.526.193,83	10.547.333.659,77
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.534.822.234,87	1.264.199.385,87
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.110.911.052,16	4.027.579.507,16
8	Alat Laboratorium	345.635.500,00	339.760.500,00
9	Alat Persenjataan	19.850.000,00	0,00
10	Komputer	3.154.385.050,89	2.900.426.560,89
11	Alat Keselamatan Kerja	0,00	19.850.000,00
12	Peralatan Olahraga	85.649.912,00	35.829.912,00
	Jumlah	<b>30.096.043.362,06</b>	<b>28.319.319.398,00</b>

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 di Dinas Sosial dan UPTD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 27 Peralatan dan Mesin Dinas Sosial dan UPTD**

No	Unit	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Sosial	8.466.514.750,39	7.951.216.528,33
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	6.831.353.494,00	7.161.931.242,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	1.944.467.420,00	1.770.150.420,00
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	3.192.391.606,84	3.045.671.005,84
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	2.806.735.336,00	2.264.822.267,00
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	3.320.681.920,00	2.852.901.120,00
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	3.533.898.834,83	3.272.626.814,83
	Jumlah	<b>30.096.043.362,06</b>	<b>28.319.319.398,00</b>

Mutasi Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

**Tabel 3. 28 Mutasi Peralatan dan Mesin**

	Uraian	2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		2022 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Alat Besar	1.091.334.000,00	454.720.794,00	168.928.794,00	1.377.126.000,00
2	Alat Angkutan	7.220.220.408,31	4.316.000,00	496.325.954,00	6.728.210.454,31
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	680.253.520,00	205.237.500,00	42.345.000,00	843.146.020,00
4	Alat Pertanian	192.531.944,00	32.499.000,00	4.250.000,00	220.780.944,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.547.333.659,77	1.769.226.428,06	641.033.893,00	11.675.526.193,83
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.264.199.385,87	308.972.849,00	38.350.000,00	1.534.822.234,87
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.027.579.507,16	120.926.545,00	37.595.000,00	4.110.911.052,16
8	Alat Laboratorium	339.760.500,00	209.714.000,00	203.839.000,00	345.635.500,00
9	Alat Persenjataan	0,00	19.850.000,00		19.850.000,00
10	Komputer	2.900.426.560,89	743.431.990,00	489.473.500,00	3.154.385.050,89
11	Alat Keselamatan Kerja	19.850.000,00		19.850.000,00	0,00
12	Peralatan Olahraga	35.829.912,00	62.620.000,00	12.800.000,00	85.649.912,00
<b>Jumlah</b>		<b>28.319.319.398,00</b>	<b>3.931.515.106,06</b>	<b>2.154.791.141,00</b>	<b>30.096.043.362,06</b>

Penjelasan mutasi Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

<b>Saldo Awal per 1 Januari 2022</b>	<b>28.319.319.398,00</b>
<b>Bertambah:</b>	
1. Alat Besar	
a. Belanja Modal	
- BRTPD	
- BPRSW	
- BRPSR	
- BPSTW	
2. Alat Angkutan	
a. Reklasifikasi dari Persediaan	
- Dinas Sosial	
- BRSBKL	
3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	
a. Belanja Modal	
- BRSPA	
b. Reklasifikasi dari Persediaan	
- BRPSR	
- BRSPA	
c. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- BRSPA (dari Alat Laboratorium)	
4. Alat Pertanian	
a. Reklasifikasi dari Persediaan	
- BRTPD	
- Dinas Sosial	
b. Mutasi Masuk dari BPBD	
- Dinas Sosial	
- BRTPD	
- BPRSW	
- BRSBKL	
- BRPSR	
- BRSPA	
- BPSTW	
c. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- BRSPA (dari Alat Kantor dan Rumah Tangga)	
5. Alat Kantor dan Rumah Tangga	
a. Belanja Modal	
- Dinas Sosial	
- BRTPD	
- BPRSW	
- BRSBKL	
- BRPSR	
- BRSPA	
- BPSTW	
b. Reklasifikasi dari Persediaan	
- Dinas Sosial	
- BRTPD	
- BPRSW	
- BRSBKL	
- BRPSR	
- BRSPA	
- BPSTW	
c. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- Dinas Sosial (dari Alat Eksplorasi)	
- BRTPD (dari Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar)	
- BPRSW (dari Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar)	

- BPRSW (dari Komputer)	13.850.000,00
- BPRSW (dari Alat Eksplorasi)	9.202.000,00
- BPRSW (dari Alat Peraga)	1.000.000,00
- BRPSR (dari Komputer)	23.000.000,00
- BRSPA (dari Komputer)	27.815.000,00
- BPSTW (dari Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar)	5.600.000,00
d. Penyesuaian Saldo Akhir	0,06
6. Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
a. Belanja Modal	
- BRTPD	32.437.000,00
- BPRSW	3.374.000,00
- BRSBKL	69.013.909,00
- BRPSR	22.295.800,00
- BPSTW	5.600.000,00
b. Reklasifikasi dari Persediaan	
- BRTPD	4.680.000,00
c. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- BRTPD (dari Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga)	3.647.016,00
- BRTPD (dari Alat Kantor dan Rumah Tangga)	3.375.000,00
- BRTPD (dari Komputer)	8.604.000,00
- BRTPD (dari Bahan Perpustakaan)	3.874.000,00
- BPRSW (Alat Peraga)	6.800.000,00
- BPRSR (dari Alat Kantor dan Rumah Tangga)	29.023.324,00
- BRSPA (dari Alat Kantor dan Rumah Tangga)	46.483.400,00
- BRSPA (dari Komputer)	10.000.000,00
- BRSPA (dari Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga)	46.785.400,00
- BPSTW (dari Alat Kantor dan Rumah Tangga)	11.700.000,00
- BPSTW (dari Komputer)	1.280.000,00
7. Alat Kedokteran dan Kesehatan	
a. Belanja Modal	
- BRTPD	75.996.000,00
- BPSTW	25.444.000,00
b. Reklasifikasi dari Persediaan	
- Dinas Sosial	11.800.000,00
- BRSBKL	5.298.000,00
c. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- BPRSW (dari Alat Peraga)	1.700.000,00
- BRPSR (dari Alat Kantor dan Rumah Tangga)	688.545,00
8. Alat Laboratorium	
a. Belanja Modal	
- BRSPA	197.500.000,00
b. Reklasifikasi dari Persediaan	
- Dinas Sosial	725.000,00
- BPRSW	4.089.000,00
c. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- BPRSW (dari Alat Peraga)	7.400.000,00
9. Alat Persenjataan	
a. Penyesuaian Saldo Awal	
- Dinas Sosial	19.850.000,00
10. Komputer	
a. Belanja Modal	
- Dinas Sosial	189.151.997,00
- BRTPD	97.862.000,00
- BPRSW	54.131.000,00
- BRSBKL	109.889.993,00
- BRPSR	183.100.000,00
- BRSPA	54.017.000,00
- BPSTW	44.980.000,00
b. Reklasifikasi dari Persediaan	
- BRTPD	2.700.000,00
c. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- BRTPD	500.000,00
- BPRSW	7.100.000,00
11. Alat Keselamatan Kerja	
-	
12. Peralatan Olahraga	
a. Reklasifikasi dari Persediaan	
- Dinas Sosial	13.000.000,00
- BRTPD	47.320.000,00
b. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- BRTPD (dari Alat Kedokteran dan Kesehatan)	2.300.000,00
<b>Jumlah Bertambah</b>	<b>3.931.515.106,06</b>
<b>Berkurang:</b>	
1. Alat Besar	
a. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- BRPSR (ke Gedung dan Bangunan)	77.700.000,00
- BRPSR (Alat Pertanian)	71.578.794,00
b. Usulan Penghapusan	
- Dinas Sosial	10.900.000,00
- BPSTW	8.750.000,00
2. Alat Angkutan	
a. Usulan Penghapusan	
- Dinas Sosial	157.706.000,00
- BRTPD	261.619.954,00
- BRSBKL	77.000.000,00

3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	
- BRTPD	5.000.000,00
- BRSBKL	31.645.000,00
- BRSPA	5.700.000,00
4. Alat Pertanian	
a. Usulan Penghapusan	
a. Usulan Penghapusan	4.250.000,00
5. Alat Kantor dan Rumah Tangga	
a. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- BRTPD (ke Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar)	3.375.000,00
- BRTPD (ke Komputer)	500.000,00
- BRPSR (ke Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar)	29.023.324,00
- BRPSR (ke Alat Kedokteran dan Kesehatan)	688.545,00
- BRSPA (ke Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar)	46.483.400,00
- BRSPA (ke Alat Pertanian)	5.340.000,00
- BPSTW (ke Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar)	11.700.000,00
b. Reklasifikasi ke Persediaan	
- BRTPD	5.208.000,00
c. Usulan Penghapusan	
- Dinas Sosial	96.205.534,00
- BRTPD	233.359.710,00
- BPRSW	4.200.000,00
- BRSBKL	54.320.300,00
- BRPSR	9.225.000,00
- BRSPA	59.260.200,00
- BPSTW	25.007.980,00
d. Ekstrakomtabel	
- Dinas Sosial	10.537.000,00
- BPRSW	12.784.000,00
- BRSBKL	3.480.000,00
- BRPSR	26.000.000,00
- BRSPA	713.900,00
- BPSTW	3.622.000,00
6. Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
a. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- BRTPD (ke Alat Kantor dan Rumah Tangga)	9.696.000,00
- BPRSW (ke Alat Kantor dan Rumah Tangga)	3.374.000,00
- BPSTW (ke Alat Kantor dan Rumah Tangga)	5.600.000,00
b. Usulan Penghapusan	
- Dinas Sosial	5.250.000,00
- BRTPD	13.680.000,00
- BRSPA	750.000,00
7. Alat Kedokteran dan Kesehatan	
a. Reklasifikasi ke Persediaan	
- BRTPD	3.871.000,00
b. Usulan Penghapusan	
- BRTPD	26.114.000,00
- BPSTW	5.310.000,00
c. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- BRTPD (ke Peralatan Olahraga)	2.300.000,00
8. Alat Laboratorium	
a. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- BRSPA (ke Alat Bengkel dan Alat Ukur)	197.500.000,00
b. Usulan Penghapusan	
- BPRSW	3.150.000,00
d. Ekstrakomtabel	
- BPRSW	3.189.000,00
9. Alat Persenjataan	
-	
10. Komputer	
a. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- BRTPD (ke Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar)	8.604.000,00
- BPRSW (ke Alat Kantor dan Rumah Tangga)	13.850.000,00
- BRPSR (ke Alat Kantor dan Rumah Tangga)	23.000.000,00
- BRSPA (ke Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar)	10.000.000,00
- BRSPA (ke Alat Kantor dan Rumah Tangga)	27.815.000,00
- BPSTW (ke Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar)	1.280.000,00
b. Usulan Penghapusan	
- Dinas Sosial	20.681.000,00
- BRTPD	157.737.000,00
- BRSBKL	122.660.000,00
- BRSPA	57.472.500,00
- BPSTW	46.374.000,00
11. Alat Keselamatan Kerja	
a. Penyesuaian Saldo Awal	
- Dinas Sosial	19.850.000,00
12. Peralatan Olahraga	
a. Usulan Penghapusan	
- BRTPD	9.000.000,00
- BPRSW	3.800.000,00
Jumlah Berkurang	2.154.791.141,00
Saldo per 31 Desember 2022	30.096.043.363,06

<b>3.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp109.000.697.502,00</b>	<b>Rp97.464.049.920,82</b>
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp109.000.697.502,00 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3. 29 Rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Bangunan Gedung	107.982.015.432,00	97.055.032.036,82
2	Monumen	82.288.140,00	82.288.140,00
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	936.393.930,00	326.729.744,00
<b>Jumlah</b>		<b>109.000.697.502,00</b>	<b>97.464.049.920,82</b>

Adapun rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 di Dinas Sosial dan UPTD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 30 Gedung dan Bangunan Dinas Sosial dan UPTD**

No	Unit	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Sosial	9.759.437.670,57	8.630.511.093,57
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	62.035.183.934,00	61.719.836.050,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	3.054.312.090,60	754.361.983,98
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	15.819.945.230,56	10.906.607.604,00
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	6.552.934.750,00	5.076.410.649,00
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	6.921.775.240,27	6.034.978.740,27
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	4.857.108.586,00	4.341.343.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>109.000.697.502,00</b>	<b>97.464.049.920,82</b>

Mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

**Tabel 3. 31 Mutasi Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		2022 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Bangunan Gedung	97.055.032.036,82	11.309.386.348,00	382.402.952,82	107.982.015.432,00
2	Monumen	82.288.140,00	-	-	82.288.140,00
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	326.729.744,00	609.664.186,00	-	936.393.930,00
<b>Jumlah</b>		<b>97.464.049.920,82</b>	<b>11.919.050.534,00</b>	<b>382.402.952,82</b>	<b>109.000.697.502,00</b>

Penjelasan mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

<b>Saldo Awal per 1 Januari 2022</b>	<b>97.464.049.920,82</b>
<b>Bertambah:</b>	
1. Bangunan Gedung	
a. Belanja Modal	
- Dinas Sosial	1.011.787.177,00
- BPRSW	1.410.546.165,00
- BRSBKL	5.212.472.549,00
- BPRSR	1.398.824.101,00
- BRSPA	886.796.500,00
b. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (Kapitalisasi)	
- BRTPD	315.347.884,00
- BPRSW	400.419.186,00
- BPSTW	515.764.786,00
c. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- BPRSR (dari Alat Besar)	77.700.000,00
d. Reklasifikasi dari KDP	
- BPRSW	70.170.000,00
e. Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel	
- BPRSW	9.558.000,00
2. Tugu Titik Kontrol/Pasti	
a. Belanja Modal	
- Dinas Sosial	167.699.400,00

- BPRSW	201.200.000,00
b. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	
- BPSTW	240.764.786,00
<b>Jumlah Bertambah</b>	
	<b>11.919.050.534,00</b>
<b>Berkurang:</b>	
1. Bangunan Gedung	
a. Penghapusan	
- BPRSW	32.708.030,38
b. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- BRSBKL (ke Bangunan Air)	299.134.922,00
c. Reklasifikasi ke KDP	
- BPRSW	50.560.000,00
d. Penyesuaian Saldo Akhir	0,44
2. Tugu Titik Kontrol/Pasti	
<b>Jumlah Berkurang</b>	<b>382.402.952,82</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>109.000.697.502,00</b>

**3.2.1.2.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi** Rp2.258.005.395,94 Rp1.715.679.679,50

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp2.258.005.395,94 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3. 32 Rincian Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	340.668.000,00	291.668.000,00
2	Bangunan Air	1.312.735.895,94	940.488.973,50
3	Instalasi	233.031.256,00	233.031.256,00
4	Jaringan	371.570.244,00	250.491.450,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.258.005.395,94</b>	<b>1.715.679.679,50</b>

Adapun rincian saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2022 di Dinas Sosial dan UPTD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 33 Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Sosial dan UPTD**

No	Unit	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Sosial	1.027.058.087,50	953.946.087,50
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	119.271.000,00	119.271.000,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	142.455.000,00	93.455.000,00
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	686.822.814,44	387.687.892,00
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	104.559.094,00	7.980.300,00
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	34.425.000,00	34.425.000,00
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	143.414.400,00	118.914.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.258.005.395,94</b>	<b>1.715.679.679,50</b>

Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagai berikut:

**Tabel 3. 34 Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

No	Uraian	2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		2021 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Jalan dan Jembatan	291.668.000,00	49.000.000,00		340.668.000,00
2	Bangunan Air	940.488.973,50	372.246.922,44		1.312.735.895,94
3	Instalasi	233.031.256,00	7.700.000,00	7.700.000,00	233.031.256,00
4	Jaringan	250.491.450,00	121.078.794,00		371.570.244,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.715.679.679,50</b>	<b>550.025.716,44</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>2.258.005.395,94</b>

Penjelasan mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagai berikut:

<b>Saldo Awal per 1 Januari 2022</b>	<b>1.715.679.679,50</b>
<b>Bertambah:</b>	
1. Jalan dan Jembatan	
a. Belanja Modal	
- BPRSW	49.000.000,00
2. Bangunan Air	
a. Belanja Modal	
- Dinas Sosial	65.412.000,00
b. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- Dinas Sosial (dari Instalasi)	7.700.000,00
- BRSBKL (dari Bangunan Gedung)	299.134.922,00
c. Penyesuaian Saldo Akhir	0,44
3. Instalasi	
a. Belanja Modal	
- Dinas Sosial	7.700.000,00
4. Jaringan	
a. Belanja Modal	
- BPRSR	25.000.000,00
- BPSTW	24.500.000,00
b. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- BPRSR (dari Alat Besar)	71.578.794,00
<b>Jumlah Bertambah</b>	<b>550.025.716,44</b>
<b>Berkurang:</b>	
1. Jalan dan Jembatan	
-	
2. Bangunan Air	
-	
3. Instalasi	
a. Reklasifikasi Antar Rekening Aset	
- Dinas Sosial (ke Bangunan Air)	7.700.000,00
4. Jaringan	
-	
<b>Jumlah Berkurang</b>	<b>7.700.000,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>2.258.005.395,94</b>

**3.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya** **Rp635.210.807,00** **Rp579.686.587,00**

Saldo Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya sebesar Rp635.210.807,00 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3. 35 Rincian Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	102.263.242,00	102.263.242,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	532.947.565,00	477.423.345,00
	<b>Jumlah</b>	<b>635.210.807,00</b>	<b>579.686.587,00</b>

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 di Dinas Sosial dan UPTD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 36 Aset Tetap Lainnya Dinas Sosial dan UPTD**

No	Unit	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Sosial Induk	23.102.000,00	23.102.000,00
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	94.275.220,00	38.751.000,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	76.909.460,00	76.909.460,00
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	169.019.327,00	169.019.327,00
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	45.656.000,00	45.656.000,00
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	60.806.000,00	60.806.000,00
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	165.442.800,00	165.442.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>635.210.807,00</b>	<b>579.686.587,00</b>

Mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

**Tabel 3. 37 Mutasi Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		2021 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Bahan Perpustakaan	102.263.242,00	3.874.000,00	3.874.000,00	102.263.242,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	477.423.345,00	105.956.636,00	50.432.416,00	532.947.565,00
<b>Jumlah</b>		<b>579.686.587,00</b>	<b>109.830.636,00</b>	<b>54.306.416,00</b>	<b>635.210.807,00</b>

Penjelasan mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

<b>Saldo Awal per 1 Januari 2022</b>	<b>579.686.587,00</b>
<b>Bertambah:</b>	
1. Bahan Perpustakaan	
a. Belanja Modal	
- BRTPD	
3.874.000,00	
2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
a. Belanja Modal	
- BRTPD	
59.171.236,00	
- BRSPA	
46.785.400,00	
<b>Jumlah Bertambah</b>	
<b>109.830.636,00</b>	
<b>Berkurang:</b>	
1. Bahan Perpustakaan	
a. Reklas Antar Rekening Aset	
- BRTPD (ke Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar)	
3.874.000,00	
2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
- BRTPD (ke Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar)	
3.647.016,00	
- BRSPA (ke Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar)	
46.785.400,00	
<b>Jumlah Berkurang</b>	
<b>54.306.416,00</b>	

**3.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan** Rp366.905.500,00 Rp337.655.500,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp366.905.500,00 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3. 38 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021(Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp366.905.500,00	337.655.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp366.905.500,00</b>	<b>337.655.500,00</b>

Adapun rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 di Dinas Sosial dan UPTD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 39 Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Sosial dan UPTD**

No	Unit	Nilai Per 31-12-2022 (Rp)	Nilai Per 31-12-2021 (Rp)
1	Dinas Sosial Induk	160.442.000,00	61.022.000,00
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	41.937.500,00	41.937.500,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	-	70.170.000,00
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	-	-
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	10.010.000,00	10.010.000,00
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	138.952.000,00	138.952.000,00
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	15.564.000,00	15.564.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>366.905.500,00</b>	<b>337.655.500,00</b>

**Tabel 3. 40 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

No	Uraian	2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		2022 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	337.655.500,00	99.420.000,00	70.170.000,00	366.905.500,00
	Jumlah	<b>337.655.500,00</b>	<b>99.420.000,00</b>	<b>70.170.000,00</b>	<b>366.905.500,00</b>

Penjelasan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2021	337.655.500,00
<b>Bertambah:</b>	
1. Konstruksi Dalam Pengerjaan	
a. Reklasifikasi dari Aset dan Beban	
- Dinas Sosial (dari Gedung Tempat Kerja Lainnya)	50.560.000,00
- Dinas Sosial (dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural)	48.860.000,00
Jumlah Bertambah	<b>99.420.000,00</b>
<b>Berkurang:</b>	
1. Konstruksi Dalam Pengerjaan	
a. Reklas ke Aset	
- BPRSW (ke Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya)	14.630.000,00
- BPRSW (ke Bangunan Gedung Tempat Pendidikan)	55.540.000,00
Jumlah Berkurang	<b>70.170.000,00</b>
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	<b>366.905.500,00</b>

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp366.905.500,00 merupakan DED dari saldo dari tahun sebelumnya belum terlaksana pembangunannya hingga akhir tahun 2022 senilai Rp267.485.500,00 serta penambahan dari DED di tahun 2022 senilai Rp99.420.000,00.

### 3.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Rp(55.938.704.377,41) **Rp(53.693.718.878,63)**

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp(55.938.704.377,41) merupakan pengakuan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 41 Rincian Akumulasi Penyusutan**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(24.995.693.449,34)	(24.843.692.694,35)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(30.067.384.926,61)	(28.069.792.535,99)
4	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(627.749.994,83)	(553.125.629,97)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(247.876.006,63)	(227.108.018,32)
	Jumlah	<b>(55.938.704.377,41)</b>	<b>(53.693.718.878,63)</b>

Adapun rincian saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 di Dinas Sosial dan UPTD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 42 Akumulasi Penyusutan Dinas Sosial dan UPTD**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021
1	Dinas Sosial	(11.337.038.340,46)	(10.990.435.433,05)
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	(22.354.806.978,17)	(21.676.005.786,17)
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	(1.849.622.931,41)	(1.657.389.977,34)
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	(5.517.628.431,88)	(5.367.675.599,64)
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	(4.802.089.733,01)	(4.417.261.232,50)
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	(5.406.239.666,25)	(5.226.311.191,34)
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	(4.671.278.296,23)	(4.358.639.658,59)
	Jumlah	<b>55.938.704.377,41)</b>	<b>(53.693.718.878,63)</b>

**3.2.1.3 Aset Lainnya** **Rp349.767.341,50** **Rp239.743.084,00**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp349.767.341,50 merupakan aset di Dinas Sosial yang meliputi Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 43 Rincian Aset Lainnya**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.950.084,00	2.950.084,00
2	Aset Tidak Berwujud	225.815.150,00	136.166.000,00
3	Aset Lain-lain	121.002.107,50	100.627.000,00
Jumlah		<b>349.767.341,50</b>	<b>239.743.084,00</b>

**3.2.1.3.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga** **Rp2.950.084,00** **Rp2.950.084,00**

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.950.084,00 merupakan nilai tercatat Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dengan harga perolehan sebesar Rp2.950.084,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 44 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	2.950.084,00	2.950.084,00
Jumlah		<b>2.950.084,00</b>	<b>2.950.084,00</b>

Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa merupakan aset Dinas Sosial berupa Tanah dan Bangunan Eks Rumah Dinas di Jl. Munggur 32, Yogyakarta yang disewa oleh BUKP Gondokusuman, Yogyakarta. Adapun perjanjian sewa dengan BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta.

**3.2.1.3.2 Aset Tak Berwujud** **Rp225.815.150,00** **Rp136.166.000,00**

Saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp225.815.150,00 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3. 45 Rincian Aset Tak Berwujud**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Software	89.649.150,00	136.166.000,00
2	Aset Tidak Berwujud Lainnya	136.166.000,00	-
Jumlah		<b>225.815.150,00</b>	<b>136.166.000,00</b>

Saldo Aset Tak Berwujud senilai Rp225.815.150,00 atau terdapat penambahan senilai Rp89.649.150,00 yaitu kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus yaitu berupa pembuatan aplikasi Sistem Informasi Perlindungan, Asessment dan Rehabilitasi Sosial (SiPersis) Dinas Sosial DIY. Adapun rincian mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

**Tabel 3. 46 Mutasi Aset Tak Berwujud**

No	Uraian	2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		2022 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Software	136.166.000,00	89.649.150,00	136.166.000,00	89.649.150,00

2	Aset Tidak Berwujud Lainnya	0.00	136.166.000,00		136.166.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>136.166.000,00</b>	<b>225.815.150,00</b>	<b>136.166.000,00</b>	<b>225.815.150,00</b>

Penjelasan mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

<b>Saldo Awal per 1 Januari 2022</b>	<b>136.166.000,00</b>
Bertambah:	
1. Software	
a. Reklasifikasi dari Beban	
- Dinas Sosial (dari Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus)	89.649.150,00
2. Aset Tidak Berwujud Lainnya	
- Dinas Sosial (dari Software)	136.166.000,00
<b>Jumlah Bertambah</b>	<b>225.815.150,00</b>
-	
Berkurang:	
1. Software	
a. Reklasifikasi Antar Rekening	
- Dinas Sosial (ke Aset Tak Berwujud Lainnya)	136.166.000,00
2. Aset Tidak Berwujud Lainnya	
-	
<b>Jumlah Berkurang</b>	<b>136.166.000,00</b>
-	
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2022</b>	<b>225.815.150,00</b>

**3.2.1.3.3 Aset Lain-lain** **Rp121.002.107,50** **Rp100.627.000,00**

Saldo Aset Lain-lain sebesar Rp121.002.107,50 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3. 47 Rincian Aset Lain-lain**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Aset Lain-lain	121.002.107,50	100.627.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>121.002.107,50</b>	<b>100.627.000,00</b>

Aset Lain-lain merupakan Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2022 sebesar Rp121.002.107,50 adalah nilai buku aset lain-lain dengan nilai perolehan sebesar Rp1.914.731.178,94 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp1.793.729.071,44.

**3.2.2 Kewajiban** **Rp78.801.840,00** **Rp75.386.718,00**

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp78.801.840,00 dengan rincian sebagai berikut:

**3.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek** **Rp78.801.840,00** **Rp75.386.718,00**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp78.801.840,00 dengan rincian sebagai berikut:

**3.2.2.1.1 Utang Belanja** **Rp78.801.840,00** **Rp75.386.718,00**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp78.801.840,00 merupakan beban Dinas Sosial atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2022 tetapi belum dibayar oleh Dinas Sosial dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 48 Rincian Utang Belanja**

No.	Uraian	2022 (Rp)	2022 (Rp)
I	<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>		
	a. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	5.826.243,00	5.843.512,00
	b. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	7.561.340,00	7.956.250,00
	c. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	64.809.257,00	60.977.156,00
	d. Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	605.000,00	599.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>78.801.840,00</b>	<b>75.376.718,00</b>

Adapun rincian saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 di Dinas Sosial dan UPTD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 49 Utang Belanja Dinas Sosial Induk dan UPTD**

No	Unit	Utang Belanja Jasa Kantor			
		Tagihan Telepon	Tagihan Air	Tagihan Listrik	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
1	Dinas Sosial	2.975.489,00	1.976.370,00	21.875.353,00	-
2	BRTPD	104.833,00	-	12.780.920,00	605.000,00
3	BPRSW	58.000,00	-	6.135.762,00	-
4	BRSBKL	638.808,00	2.217.700,00	6.511.691,00	-
5	BPRSR	388.544,00	-	4.715.517,00	-
6	BRSPA	712.397,00	3.296.770,00	4.221.500,00	-
7	BPSTW	948.172,00	70.500,00	8.568.514,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5.826.243,00</b>	<b>7.561.340,00</b>	<b>64.809.257,00</b>	<b>605.000,00</b>
			<b>Total</b>		<b>78.801.840,00</b>

**3.2.3 Ekuitas** **Rp106.614.847.079,64** **Rp95.184.358.519,19**

Saldo Ekuitas Dinas Sosial DIY Rp106.614.847.079,64 merupakan kekayaan bersih Dinas Sosial DIY yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Dinas Sosial DIY pada tanggal 31 Desember 2022. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti penyesuaian Saldo Awal Aset Tetap, Pencatatan ke Ekstrakomtabel, penghapusan Aset Tetap dan lain-lain. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp106.614.847.079,64 mengalami kenaikan sebesar Rp11.430.488.560,45 atau 12,01% dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp95.184.358.519,19.

### 3.3 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

**3.3.1 Pendapatan-LO** **Rp484.200.000,00** **Rp409.751.000,00**

Pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp484.200.000,00 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO dengan rincian sebagai berikut:

**3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO** **Rp484.200.000,00** **Rp388.200.000,00**

Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2022 Dinas Sosial sebesar Rp484.200.000,00 merupakan

Pendapatan Retribusi Daerah – LO dengan rincian sebagai berikut:

**3.3.1.1.1 Retribusi Daerah-LO** **Rp484.200.000,00** **Rp388.200.000,00**

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 202 sebesar Rp484.200.000,00 adalah Pendapatan Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Retribusi Pemakaian Ruangan. Pendapatan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 96.000.000,00 dari pendapatan tahun lalu sebesar Rp388.200.000,00 atau sebesar 24,73%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 3. 50 Pendapatan Dinas Sosial Induk dan UPTD**

No	Unit	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Sosial Induk	4.200.000,00	4.200.000,00
2	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	480.000.000,00	384.000.000,00
Jumlah		<b>484.200.000,00</b>	<b>388.200.000,00</b>

Pendapatan Dinas Sosial tersebut berasal dari sewa tempat untuk kantin dan fotokopi di Dinas Sosial Induk, dan sewa Ruang/kamar untuk klien di BPSTW.

**3.3.2 Beban** **Rp103.506.005.271,55** **Rp88.592.145.690,66**

Realisasi Beban Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp103.506.005.271,55 merupakan penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran, dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

**3.3.2.1 Beban Operasi** **Rp99.771.653.470,13** **Rp83.492.315.296,04**

Realisasi Beban Operasi Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp99.771.653.470,13 terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah dan Beban Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut:

**3.3.2.1.1 Beban Pegawai** **Rp39.900.047.351,00** **Rp35.638.179.721,00**

Realisasi Beban Pegawai Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar 39.900.047.351,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 51 Rincian Beban Pegawai**

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	21.054.691.117,00	20.835.205.147,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	18.544.930.234,00	14.515.468.574,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	300.426.000,00	287.506.000,00
Jumlah		<b>39.900.047.351,00</b>	<b>35.638.179.721,00</b>

**3.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa** **Rp52.181.719.509,13** **Rp42.645.709.910,04**

Realisasi Beban Barang dan Jasa Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp52.181.719.509,13 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 52 Rincian Beban Barang dan Jasa**

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Barang	21.958.853.624,95	19.869.280.167,00
2	Beban Jasa	24.897.189.977,00	19.139.428.955,00
3	Beban Pemeliharaan	2.362.406.652,18	1.651.151.056,04
4	Beban Perjalanan Dinas	2.252.269.255,00	1.635.924.732,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	711.000.000,00	349.925.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>52.181.719.509,13</b>	<b>42.645.709.910,04</b>

**3.3.2.1.3 Beban Hibah** **1.064.486.610,00** **812.425.665,00**

Realisasi Beban Hibah Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.064.486.610,00 merupakan hibah kepada Lembaga atau organisasi kemasyarakatan dengan sebagai berikut:

**Tabel 3. 53 Rincian Beban Hibah**

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	276.600.000,00	176.600.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	47.000.000,00	46.000.000,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	740.886.610,00	589.825.665,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.064.486.610,00</b>	<b>812.425.665,00</b>

Beban hibah senilai Rp1.064.486.610,00 tersebut terdiri dari hibah uang sebesar Rp561.600.000,00 dan hibah barang sebesar Rp502.886.610,00, dengan rincian:

**Tabel 3. 54 Rincian Beban Hibah Menurut Bentuknya**

No	Uraian	Hibah Uang (Rp)	Hibah Barang (Rp)	Total Hibah (Rp)
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	276.600.000,00	-	276.600.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	47.000.000,00	-	47.000.000,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	238.000.000,00	502.886.610,00	740.886.610,00
<b>Jumlah</b>		<b>561.600.000,00</b>	<b>502.886.610,00</b>	<b>1.064.486.610,00</b>

**3.3.2.1.4 Beban Bantuan Sosial** **Rp6.625.400.000,00** **Rp4.396.000.000,00**

Realisasi Beban Bantuan Sosial Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.625.400.000,00 merupakan Bantuan Sosial untuk untuk Lembaga melalui Program Rehabilitasi Sosial pada Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak

Terlantar di Dalam Panti dan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti total senilai total Rp3.586.400.000,00. Selain itu, Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu yang merupakan penyaluran Bantuan Sosial Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) senilai Rp956.400.000,00 dan Bantuan Sosial Penanganan Dampak Inflasi senilai Rp2.082.600.000,00.

**Tabel 3. 55 Rincian Beban Bantuan Sosial**

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.039.000.000,00	-
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	1.200.000.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.586.400.000,00	3.196.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.625.400.000,00</b>	<b>4.396.000.000,00</b>

**3.3.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi** **Rp3.734.351.801,42** **Rp5.099.830.394,62**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.734.351.801,42 dengan rincian Beban Penyusutan sebesar 3.734.351.801,42 dan Amortisasi Rp0,00. Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 56 Beban Penyusutan Dinas Sosial**

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.635.003.826,43	1.295.917.544,50
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.003.955.621,82	3.720.989.931,05
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	74.624.364,86	72.077.652,41
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	20.767.988,31	10.845.266,66
<b>Jumlah</b>		<b>3.734.351.801,42</b>	<b>5.099.830.394,62</b>

**3.3.3 Surplus/Defisit –LO** **Rp(103.021.805.271,55)** **Rp(88.182.394.690,66)**

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(102.941.012.742,37) berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp484.200.000,00 dikurangi dengan Beban sebesar Rp103.506.005.271,55. Pendapatan-LO merupakan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp484.200.000,00.

#### **3.4 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berisi informasi tentang Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

**3.4.1 Ekuitas Awal** **Rp95.184.358.519,19** **Rp94.366.147.531,27**

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp95.184.358.519,19 mengalami kenaikan sebesar Rp818.210.987,92 atau 0,87% dibandingkan dengan Ekuitas Awal Tahun 2021 yaitu sebesar Rp94.366.147.531,27.

**3.4.2 Surplus/Defisit** **Rp(102.941.012.742,37)** **Rp(88.182.394.690,66)**

Surplus/Defisit LO Tahun 2022 sebesar Rp(102.941.012.742,37) merupakan selisih antara Pendapatan-LO sebesar Rp484.200.000,00 dengan Beban-LO sebesar Rp103.425.212.742,37.

**3.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar** **Rp16.429.830,00** **Rp(297.820.994,46)**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2022 sebesar Rp16.429.830,00 merupakan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 57 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

No	Uraian	(Rp)
1	Mutasi Masuk - Aset Tetap dari BPBD	25.500.000,00
2	Mutasi Masuk - Akumulasi Penyusutan dari BPBD	(12.750.000,00)
3	Reklasifikasi Ekstrakomtabel ke Intrakomptabel (Bangunan Gedung Tempat Ibadah)	9.558.000,00
4	Reklasifikasi Ekstrakomtabel ke Intrakomptabel (Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah)	(5.878.170,00)
<b>Jumlah</b>		<b>16.429.830,00</b>

**3.4.4 Ekuitas Akhir** **Rp106.614.847.079,64** **Rp95.184.358.519,19**

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp106.614.847.079,64 merupakan kekayaan bersih yang dimiliki Dinas Sosial sampai dengan akhir Desember 2022.

## BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

### 4.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Sosial DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Sosial DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4. 1 Capaian Kinerja Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATU AN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<u>Indikator:</u> Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial  <u>Meta Indikator:</u> Persentase target penanganan PMKS dibagi jumlah populasi (N-2)  Formulasi Perhitungan : Rata-Rata Prosentase Program Penanganan PMKS dibagi 9 = %Rehabsos+%Linjamsos+ %Fakir Miskin+%BRTPD+ %BPRSW+%BRSBKL%BPRSR +%BRSPA+%BPSTW dibagi 9	%	n/a	94,96	44,28	47,27	106,75	Sangat Baik	106,75
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	<u>Indikator:</u> Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial  <u>Meta Indikator:</u> Persentase target pembinaan PSKS dibagi jumlah populasi PSKS (N-2)  Formulasi Perhitungan : (%PSM + %tagana + %LKS + %karang taruna + %WKSBM + %TKSK + %dunia usaha + %jiwa kepahlawanan + %kesehjahteraan keluarga pahlawan) dibagi 9	%	63,4	134,99	51,60	65,34	126,63	Sangat Baik	126,63

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

#### 4.1.1. Sasaran 1: Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan

## perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kinerja sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 4. 2 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	Persentase target penanganan PMKS dibagi jumlah populasi (N-2)  Formulasi Perhitungan : Rata-Rata Prosentase Program Penanganan PMKS dibagi 9 = %Rehabsos+%Linjamsos+ %Fakir Miskin+%BRTPD+%BPRSW+%BRSBKL+ %BPRSR+ %BRSPA+%BPSTW dibagi 9

Kinerja Sasaran diatas diukur dengan indikator persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial yang merupakan penghitungan komposit dari 9 (sembilan) sub indikator sebagai berikut :

- Hasil Penanganan PMKS melalui Program Rehabilitasi Sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIY melaksanakan rehabilitasi sosial untuk meningkatkan persentase anak bawah lima tahun terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, pemulung, orang dengan HIV AIDS, dan korban tindak kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri, dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Capaian hasil penanganan PMKS melalui Program Rehabilitasi Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 3 Capaian Hasil Penanganan PMKS Melalui Rehabilitasi Sosial**

No	Jenis PMKS	Populasi 2016	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anak Balita Terlantar	1.826	anak	28	1,53	95	5,20
2	Anak Terlantar	14.450	anak	500	3,46	555	3,84
3	Anak Jalanan	327	anak	28	8,56	64	19,57
4	Anak yang Berhadapan Hukum	184	anak	25	13,59	30	16,30
5	Anak dengan Kedisabilitasan	3.095	anak	63	2,07	70	2,26
6	Penyandang Disabilitas	26.177	orang	1.120	4,28	1000	3,82
7	Gelandangan, Pengemis dan Pemulung	771	orang	190	24,64	235	30,48
8	Orang dengan HIV/AIDS	2.834	orang	7	0,25	0	0,00
9	Korban Tindak Kekerasan	735	orang	14	1,90	1	0,14

Rerata Hasil Penanganan PMKS melalui Rehabilitasi Sosial : (Jumlah Persentase hasil penanganan masing-masing jenis PMKS dibagi jumlah komponen jenis PMKS)	= $(ABT(5,20\%)+ABH(16,30\%)+Anjal(19,57\%)+ADK(2,26\%)+AT(3,84\%)+PD(3,82\%)+Gepeng(30,48\%)+ODHA(0\%)+KTK(0,14\%))$ dibagi 9 = 9,07%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❖ Populasi diperoleh dari hasil pendataan PMKS dan PSKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY

2. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial DIY untuk melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan persentase lanjut usia terlantar, korban bencana alam, dan korban bencana sosial yang memperoleh pelindungan dan jaminan sosial. Capaian hasil penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 4 Capaian Hasil Penanganan PMKS Melalui Perlindungan dan Jaminan Sosial**

No	Jenis PMKS	Populasi 2016	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lanjut Usia Terlantar	46.242	Orang	1.400	3,03	2.450	5,30
2	Korban Bencana Alam	150.000	Orang	150.000	100,00	22.100	14,73
3	Korban Bencana Sosial	500	Orang	500	100,00	730	146
<b>Rerata Hasil Penanganan PMKS melalui Perlindungan dan Jaminan Sosial :</b>  (Jumlah Persentase hasil penanganan masing-masing jenis PMKS dibagi jumlah komponen jenis PMKS)				=( Lanjut Usia Terlantar(5,30%)+Korban Bencana Alam(14,73%)+Korban Bencana Sosial(146%)) dibagi 3 = 55,34%			

3. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Penanganan Fakir Miskin pada Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial DIY untuk melaksanakan penanganan fakir miskin dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat. Capaian hasil penanganan PMKS melalui Program Penanganan Fakir Miskin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 5 Capaian Hasil Penanganan PMKS Melalui Penanganan Fakir Miskin**

No	Jenis PMKS	Populasi 2016	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penerima Bantuan UEP PKH Gradiasi	33.212	orang	660	1,99	540	1,63
2	Fakir Miskin (Peningkatan Pengurus UEP KUBE dan KM)	367.540	orang	150	0,04	150	0,04
<b>Rerata Hasil Penanganan PMKS melalui Penanganan Fakir Miskin :</b>  (Jumlah Persentase hasil penanganan masing-masing jenis PMKS dibagi jumlah komponen jenis PMKS)				= (PKH(1,63%)+KUBE, LKM dan USEP(0,04%)) dibagi 2 = 0,83%			

❖ Populasi diperoleh dari hasil pendataan PMKS dan PSKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY

4. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas pada Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa, rungu wicara, dan werdha disabilitas untuk meningkatkan persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi haknya, mampu hidup

mandiri dan berfungsi sosial. Capaian hasil penanganan PMKS dalam BRTPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 6 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BRTPD**

No	Indikator	Daya Tampung Balai	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial (Penyandang Disabilitas)	170	orang	47	27,65	47	27,65
<b>Jumlah Persentase Penanganan Dalam Balai dibagi Daya Tampung dikali 100%</b>						<b>= 47/170*100% : 27,06%</b>	

5. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (*human trafficking*) untuk meningkatkan persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial. Capaian hasil penanganan PMKS dalam BPRSW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 7 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BPRSW**

No	Indikator	Daya Tampung Balai	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi)	60	orang	29	48,33	29	48,33
<b>Jumlah Persentase Penanganan Dalam Balai dibagi Daya Tampung dikali 100%</b>						<b>= 29/60*100% : 48,33%</b>	

6. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik pada Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan penyandang disabilitas mental untuk meningkatkan persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat. Capaian hasil penanganan PMKS dalam BRSBKL dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 8 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BRSBKL**

No	Indikator	Daya Tampung Balai	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

No	Indikator	Daya Tampung Balai	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Percentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga / masyarakat (Gelandangan, Pengemis, Pemulung)	50	Orang	10	20,00	15	30,00
2	Percentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga / masyarakat (Eks Psikotik)	250	Orang	24	9,60	99	39,6
Rerata Hasil Penanganan PMKS dalam BRSBKL : (Penanganan gelandangan, pengemis, pemulung dijumlah eks psikotik) dibagi jumlah komponen penanganan PMKS dalam balai					$= (15 \text{ gepeng dibagi } 50 \times 100\%) + (99 \text{ eks psikotik dibagi } 250 \times 100\%) \text{ dibagi } 2 = 34,80\%$		

7. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, advokasi, reunifikasi, dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga. Capaian hasil penanganan PMKS dalam BPRSR dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 9 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BPRSR**

No	Indikator	Daya Tampung Balai	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Percentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga (Anak Terlantar/Anak Putus Sekolah)	40	anak	28	70,00	7	17,50
2	Percentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga (Anak yang Berhadapan Hukum)	40	anak	40	100,00	85	212,5
Rerata Hasil Penanganan PMKS dalam BPRSR : (Penanganan anak terlantar/anak putus sekolah dijumlah eks anak yang berhadapan hukum) dibagi jumlah komponen penanganan PMKS dalam balai					$= (7 \text{ anak terlantar dibagi } 40 \times 100\%) + (85 \text{ anak berhadapan hukum dibagi } 40 \times 100\%) \text{ dibagi } 2 = 115\%$		

8. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak untuk meningkatkan persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak - haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga. Capaian hasil penanganan PMKS dalam BRSPA dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 10 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BRSPA**

No	Indikator	Daya Tampung Balai	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga (Anak Balita Terlantar)	25	anak	18	72,00	11	44,00
2	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga (Anak Terlantar)	80	anak	24	30,00	11	13,75
3	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus)	35	anak	14	40,00	9	25,71
<b>Rerata Hasil Penanganan PMKS dalam BPSTW :</b> <b>(Penanganan anak balita terlantar, anak terlantar dijumlah eks anak yang memerlukan perlindungan khusus) dibagi jumlah komponen penanganan PMKS dalam balai</b>					$= ((11 \text{ anak balita terlantar dibagi } 25 \times 100\%) + (11 \text{ anak terlantar dibagi } 80 \times 100\%) + (9 \text{ anak yang memerlukan perlindungan khusus dibagi } 35 \times 100\%)) \text{ dibagi } 3 = 27,82\%$		

9. Hasil Penanganan PMKS dalam balai melalui Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar pada Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia untuk mempertahankan persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan haknya. Capaian hasil penanganan PMKS dalam BPSTW dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 11 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BPSTW**

No	Indikator	Daya Tam pung Balai	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya (Lanjut Usia Terlantar)	214	orang	214	100,00	228	106,54
<b>Jumlah Persentase Penanganan Dalam Balai dibagi Daya Tampung dikali 100%</b>						$= ((228 \text{ lanjut usia terlantar dibagi } 214 \times) 100\% = 106,54\%$	

Hasil penghitungan komposit dari 9 (sembilan) sub indikator tersebut di atas diperoleh capaian sebagai berikut:

**Tabel 4. 12 Pengukuran Capaian Sasaran 1**

Sub-Indikator	Hasil Sub Indikator	Rata-Rata Nilai
a. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Rehabilitasi Sosial	9,07%	47,27%

Sub-Indikator	Hasil Sub Indikator	Rata-Rata Nilai
b. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	55,34%	
c. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Penanganan Fakir Miskin	0,83%	
d. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	27,65%	
e. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial	48,33%	
f. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik	34,80%	
g. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial	155%	
h. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial	27,82%	
i. Hasil Penanganan PMKS melalui Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	106,54%	

Kinerja Sasaran Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4. 13 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022**

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi social	94,96	44,28	47,27	106,75	44,28	106,75

#### **Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2022**

Analisis ketercapaian sasaran terwujudnya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah sebagai berikut:

1. Tercapai 47,27%; dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 106,75%, maka target tahun 2022 tercapai.
2. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 11,79%.
3. Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian Tahun akhir Perencanaan periode 2017-2022

#### **Faktor Pendukung Keberhasilan:**

Adanya kerjasama yang baik antara di internal Dinas Sosial DIY sendiri, serta terjalinnya hubungan baik dengan *stakeholder* yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan. Kemampuan SDM yang dimiliki juga turut menjadi faktor pendukung keberhasilan, baik petugas dari Dinas Sosial DIY ataupun pihak lain yang mendukung ketercapaian kegiatan.

#### **4.1.2. Sasaran 2: Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

Kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 4. 14 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2**

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan social	Persentase target pembinaan PSKS dibagi jumlah populasi PSKS (N-2) Formulasi Perhitungan : (%PSM + %tagana + %LKS + %karang taruna + %WKSBM + %TKSK + %dunia usaha + %jiwa kepahlawanan + %kesajahteraan keluarga pahlawan) dibagi 9

Kinerja Sasaran diatas diukur dengan indikator persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial diperoleh dari Skor Komposit Hasil Pemberdayaan PSKS dan Masyarakat melalui Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial DIY untuk melaksanakan pemberdayaan sosial guna meningkatkan persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan masyarakat yang mampu menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiaan sosial dalam masyarakat. Capaian hasil pemberdayaan PSKS melalui Program Pengembangan PSKS dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4. 15 Capaian Hasil Pemberdayaan PSKS dan Masyarakat Melalui Pemberdayaan PSKS dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan**

No	Jenis PSKS	Populasi 2016	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pekerja Sosial Masyarakat	4.767	Orang	95	1,99	275	5,77
2	Taruna Siaga Bencana	1.058	Orang	55	5,20	55	5,20
3	Karang Taruna	438	Orang	345	78,77	416	94,98
4	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	163	Orang	105	64,42	206	126,38
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	78	Orang	78	100,00	78	100
6	Lembaga Kesejahteraan Sosial	370	lembaga	40	10,81	186	50,27
7	Dunia Usaha	42	lembaga	42	100,00	42	100,00
8	Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	349.627	Orang	6.500	1,86	16.603	4,75

No	Jenis PSKS	Populasi 2016	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Percentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Percentase (%) (=7/3*100%)
9	Kesejahteraan Keluarga Pahlawan	7	Orang	7	100,00	7	100
Rerata Hasil Pemberdayaan PSKS dan Masyarakat melalui Pemberdayaan PSKS dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan : (Jumlah Persentase hasil pemberdayaan masing-masing jenis PSKS dan masyarakat dibagi jumlah komponen jenis PMKS)	= (PSM(5,77%)+Tagana(5,20%)+LKS(50,27%)+KT(94,98%)+WKSBM(126,38%)+TKSK(100%)+Dunia Usaha(100%)+Kesetiakawanan Sosial(10,81%)+Peningkatan jiwa nasionalisme(0,97%)+Kesejahteraan Keluarga Pahlawan (4,75%)) dibagi 9 = 65,34%						

❖ *Populasi diperoleh dari hasil pendataan PMKS dan PSKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY*

Kinerja Sasaran Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan indikator PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4. 16 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022**

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Percentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	134,99	51,60	65,34	126,63	51,60	126,63

#### **Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2022**

Analisis Ketercapai Sasaran terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah sebagai berikut:

1. Tercapai 65,34%; dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 126,63%, sehingga target tahun 2022 tercapai.
2. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat penurunan sebesar 8,33%.
3. Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian Tahun akhir Perencanaan periode 2017-2022

#### **Faktor Pendukung Keberhasilan :**

Adanya kerjasama yang baik antara di internal Dinas Sosial DIY sendiri, serta terjalinnya hubungan baik dengan *stakeholder* yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan. Kemampuan SDM

yang dimiliki juga turut menjadi faktor pendukung keberhasilan, baik petugas dari Dinas Sosial DIY ataupun pihak lain yang mendukung ketercapaian kegiatan.

## 4.2 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

### 4.2.1 Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial DIY Tahun 2022

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial termasuk dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan umum SPM Bidang Sosial Provinsi yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis); serta
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial Provinsi mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti;
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 17 Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	555	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	753	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	2.028	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	309	100 %	Setiap Tahun

5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	23.615	100 %	Setiap Tahun
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	--------------

#### 4.2.2 Capaian Kinerja SDGs Dinas Sosial DIY Tahun 2022

*Sustainable Development Goals (SDGs)*/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global pembangunan berkelanjutan tahun 2016 sampai tahun 2030. SDGs merupakan penyempurnaan dari *Millennium Development Goals (MDGs)*/Tujuan Pembangunan Milenium (TPM). MDGs hanya berfokus pada 8 (delapan) tujuan global, sedangkan pada SDGs terdapat penambahan tujuan global lainnya berdasarkan isu terkini hingga mencakup 17 (tujuh belas) tujuan global.

Dalam mendukung pencapaian SDGs 2016-2030, Dinas Sosial DIY mendukung pada 1 (satu) tujuan dari 17 (tujuh belas) tujuan global yang ada, yaitu pada Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan dengan 4 (empat) indikator didalamnya, yaitu :

1. Jumlah penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH Graduasi;
3. Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Kebakaran; dan
4. Pemulangan Orang Terlantar.

Adapun target dan realisasi indikator SDGs Dinas Sosial DIY tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 18 Target dan Realisasi SDGs Dinas Sosial Tahun 2022**

Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan							
<b>Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan</b>							
Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target	Realisasi	Keterangan
1.3.5	Jumlah penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial DIY	Jiwa	672	1120	737	Tercapai
1.3.6	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH Graduasi	Dinas Sosial DIY	Jiwa	n/a	660	540	Berdasarkan hasil assement dari pendamping PKH, KPM yang layak untuk mengikuti pengembangan sebanyak 540 KPM
<b>Target 1.5 : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana</b>							
Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target	Realisasi	Keterangan
1.5.5	Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Kebakaran	Dinas Sosial DIY	Orang	196	200	84	Menyesuaikan korban bencana kebakaran

1.5.6	Pemulangan Orang Terlantar	Dinas Sosial DIY	Jiwa	323	350	278	Menyesuaikan jumlah orang terlantar yang ada
-------	----------------------------	------------------	------	-----	-----	-----	----------------------------------------------

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Percentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	44,28	47,27	106,75	46.134.013.300	39.013.717.435	84,57	
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Percentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	51,60	65,34	126,63	7.643.611.500	7.274.033.270	95,16	
<b>Jumlah</b>						<b>53.777.624.800</b>	<b>46.287.750.705</b>	<b>86,07</b>	
<b>Program pendukung</b>						<b>74.357.552.442</b>	<b>68.632.313.297</b>	<b>92,30</b>	
<b>Total Belanja</b>						<b>128.135.177.242</b>	<b>114.920.064.002</b>	<b>89,69</b>	

Berdasarkan tabel III.10 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp.53.777.624.800 terealisasi Rp.46.287.750.705 atau 86,07%. Sisa anggaran sebesar Rp.7.489.874.095 atau 13,93% antara lain bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi uang saku peserta kegiatan
- Efisiensi tagihan air, listrik, telepon dan kegiatan belanja lain yang menyesuaikan harga pasar
- Efisiensi belanja mobilitas darat, akomodasi dan transportasi menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan
- Efisiensi belanja sewa (tempat, meja, kursi, genset, tenda, sound system) menyesuaikan kondisi di lapangan

#### **4.2.3 Inovasi**

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah DIY untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY diwajibkan untuk melakukan inovasi. Komitmen inovasi tersebut tertuang dalam Surat Edaran SE Gubernur DIY No. 065/12017 Tahun 2015 tentang Inovasi Pelayanan Publik yang mendorong "One Agency, One Innovation". Inovasi yang diemban oleh Perangkat Daerah ditujukan juga untuk mencapai keberhasilan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Sosial DIY Telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut :

##### **1. DIFAGANA (Difabel Siaga Bencana)**

Letak geografis Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyebabkan DIY menjadi salah satu dengan 281 titik rawan bencana. Daerah yang terdiri dari lima Kabupaten/ Kota ini memiliki potensi bencana alam maupun bencana sosial yang setiap saat dapat mengancam kehidupan warganya. Anak-anak, perempuan, lanjut usia dan penyandang disabilitas merupakan kelompok paling rentan terdampak bencana. Kendati demikian, mereka bukan kelompok yang hanya menjadi obyek pelayanan saat terjadi bencana. Mereka pun dapat berperan dalam memberikan bantuan saat terjadi bencana di shelter atau tempat pengungsian, contohnya pada Penyandang Disabilitas.

Dinas Sosial DIY menginisiasi dan membentuk DIFAGANA (Difabel Siaga Bencana) di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, Pundong, Bantul. Pembentukan DIFAGANA merupakan yang pertama di Indonesia dan baru ada di DIY. DIFAGANA adalah bentuk formal keikutsertaan aktif Penyandang Disabilitas, dalam penanggulangan aktivitas penanggulangan bencana. Pembentukan DIFAGANA berangkat dari keyakinan terhadap kemampuan Penyandang Disabilitas dalam aktivitas penanggulangan bencana, bahkan dengan nilai tambah empati dan kepekaan terhadap sesama kelompok rentan dan korban bencana. Saat ini DIFAGANA memiliki 125 personil dari Kabupaten/Kota di DIY dengan berbagai jenis kedisabilitasan dengan sebelumnya diberikan Pelatihan Dasar dan Penguatan Kapasitas oleh para Praktisi, termasuk dari TAGANA DIY.

Dalam kedisabilitasan yang dimiliki, DIFAGANA telah piawi dan mampu mengembangkan berbagai tugas kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di DIY bahkan berbagai wilayah di Indonesia seperti pada bencana gempa bumi Lombok, serta gempa dan tsunami di Palu. DIFAGANA juga telah mendapatkan Penghargaan TOP 45 INOVASI Pelayanan Publik Tahun 2022 dari Kementerian PANRB. Dari DIFAGANA, masyarakat dapat belajar bahwa dalam kondisi keterbatasan fisik sekalipun, masih memiliki potensi dan berdaya untuk membantu sesama.



Plakat Penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2022

## 2. SiPersis (Sistem Informasi Perlindungan, Assessment dan Rehabilitasi Sosial)

Memperhatikan Permendikbud No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, bahwa pelaksana rehabilitasi sosial di laksanakan di dalam panti. Dalam pelaporannya, mengikuti Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terdapat form urusan pemerintahan bidang sosial yang membutuhkan pemahaman lebih oleh semua pelaku rehabilitasi sosial agar dapat menghasilkan *output* laporan yang sesuai dan maksimal.

Dinas Sosial DIY berinovasi dengan melakukan penyusunan aplikasi SiPersis (Sistem Informasi Perlindungan, Assessment dan Rehabilitasi Sosial). Aplikasi SiPersis ini bertujuan untuk menguatkan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial sesuai Permendikbud 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, serta penguatan integritas data agar dalam pelaporannya dapat maksimal mengikuti arahan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

A screenshot of a web-based application interface titled "SI PERLINDUNGAN, ASSESSMENT DAN REHABILITASI SOSIAL". The top navigation bar includes links for "Preview" and "Sign Out". On the left, there is a sidebar menu with sections like "Administrator", "Dashboard", "SUMMARY", "Executive Summary", "REFERENSI", "Manajemen User", "Konfigurasi Fingerprint", "DATABASE", "Profil Penyedia Layanan", "Data PPKS", "Penerimaan PPKS", "Data Eks PPKS", "MAIN MODULE", and "Pemenuhan SPM". The main content area is titled "DASHBOARD" and displays several cards with icons and text: "Selamat Datang, NUR ANNISA TRESNASARI", "Selamat Datang di SI Perlindungan, Assessment dan Rehabilitasi Sosial. Silakan gunakan menu disamping untuk mengelola konten sistem", "EXECUTIVE SUMMARY" (with a briefcase icon), "MANAJEMEN USER" (with a user profile icon), "PROFIL PENYEDIA LAYANAN" (with a calculator icon), "DATA PPKS" (with a group icon), "PENERIMAAN PPKS" (with a handshake icon), "DATA EKS PPKS" (with a document icon), "PEMENUHAN SPM" (with a stack of coins icon), "USULAN INOVASI" (with a chart icon), "FORUM" (with a speech bubble icon), and "KAPASITAS PENYEDIA" (with a document icon).

Sumber:<http://sipersis.jogjaprov.go.id/>

### 3. Pendaftaran DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Daerah

Merespon perubahan kebijakan berbagi pakai data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari pemerintah pusat, mulai tahun 2022 Pemerintah Daerah DIY berupaya untuk mengelola DTKS wilayah dalam rangka melaksanakan mandat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yaitu pengelolaan data fakir miskin cakupan wilayah provinsi. Secara teknis upaya ini dilakukan oleh Dinas Sosial DIY dengan mengumpulkan data-data hasil verifikasi DTKS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat yang belum masuk dalam DTKS serta melakukan pemeringkatan kesejahteraan. Dengan optimalisasi kewenangan ini, Pemerintah Provinsi dapat berkontribusi lebih nyata dalam upaya monitoring dan evaluasi pengelolaan DTKS di wilayah DIY yang berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 kewenangan verifikasinya ada di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sumber: <http://pendaftaranlangsungdtks.jogjaprov.go.id/>

#### 4.2.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Sosial DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Sosial DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi Refocusing dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan.

**Tabel 4. 20 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Sosial DIY**

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS	Dinas Koperasi UKM DIY	Dinas Sosial DIY bersama Dinas Koperasi UKM DIY mengadakan pelatihan digital marketing untuk para pendamping serta pembinaan lanjutan untuk LKM yang sudah berbadan hukum koperasi		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Bagi OPD: Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Presentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial
		POLDA DIY	Dinas Sosial DIY bekerjasama dengan Polda DIY sebagai kegiatan penegakan perijinan UGB, instruktur bimbingan sosial di Camp Assesment dan Rumah Perlindungan Sosial (RPS)			
		Paksikaton (Paguyuban Seksi Keamanan Kraton)	Dinas Sosial DIY bekerjasama dengan Paksikaton (Paguyuban Seksi Keamanan Kraton) memberikan edukasi pada gelandangan dan pengemis di titik-titik rawan gepeng			
		Baznaz DIY Baznaz Sleman	Dinas Sosial DIY bekerjasama dengan Baznas DIY dan Baznas Sleman untuk pemberdayaan PPKS Dinas Sosial DIY sebagai pemberian modal usaha dalam rangka pemberdayaan bagi PPKS			
2.	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi, dan peran PSKS	PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)	Dinas Sosial DIY bekerjasama dengan PINBUK dalam pendampingan usaha untuk Pemasaran Online dan Penegelolaan Usaha		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Bagi OPD: Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Presentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial
		Kapanewon Kalurahan	Dinas Sosial DIY bekerjasama dengan Kapanewon dan Kalurahan untuk membantu mengadirkan peserta dalam kegiatan sebagai upaya / fasilitator untuk penyampaikan program/kegiatan Dinas Sosial DIY kepada masyarakat sebagai wujud partisipasi bersama dalam penanganan permasalahan sosial di DIY			
		PSKS yang terdiri : 1. Pekerja Sosial Profesional, Fungsional, dan Masyarakat 2. Taruna Siaga Bencana 3. LKS 4. Karang Taruna 5. LK3 6. Keluarga Pioner 7. WKSBM 8. Penyuluhan Sosial Masyarakat 9. Penyuluhan Sosial Fungsional 10. TKSK 11. Dunia Usaha	Bekerjasama dalam melakukan penanganan PMKS			

## BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Tahun 2022 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran dan disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIM ASET.

Perencanaan anggaran Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial DIY untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2022

KEPALA DINAS SOSIAL DIY

